ISSN 2460-1683

ASEAN ADALAH KITA

Masyarakat ASEAN

Edisi 13 / SEPTEMBER 2016

ASEAN untuk Rakyat

MEDIA PUBLIKASI DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

DAFTAR ISI

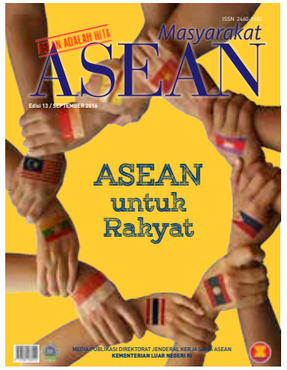

FOTO: TYPEPAD.COM

Perspektif
Menerjemahkan *Down to Earth Diplomacy* dalam Isu Prioritas di Kawasan **4**

Laporan Utama
Tinjauan *ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights* 2016 **6**
Mitra Wicara ASEAN Pertegas Komitmen dan Dukungan Terhadap Masyarakat ASEAN **18**

Laporan Khusus
Indonesia dalam Konektivitas ASEAN **26**

Pojok PSA
Meningkatkan Daya Saing Indonesia di ASEAN **30**

Wisata
Menikmati Wisata Vietnam **31**
Maumere, Surga Kecil di Nusa Tenggara Timur **34**

Pojok Sosialisasi
ASEAN Corner di *Tomohon International Flower Festival* **38**

Galeri
Peringatan HUT ASEAN ke-49 **41**

Reportase
Pariwisata Gorontalo Bersiap Kuasai Pasar ASEAN **47**

Serba Serbi
Kewarganegaraan Ganda untuk Siapa? **50**

Apa Kata Mereka 58

LAPORAN UTAMA 10

BAGAIMANA INDONESIA MEMPERJUANGKAN HAK PEKERJA MIGRAN DI ASEAN?

TRUST.ORG

Lima setengah juta pekerja migran berada di kawasan Asia Tenggara. Dari jumlah itu, tiga juta diantaranya adalah tenaga kerja Indonesia. Lalu apa yang dilakukan oleh ASEAN dan Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka? Masih terdapat perbedaan tajam di sesama negara ASEAN, antara negara pengirim dan penerima pekerja migran, terkait hak-hak pekerja migran. Ini menyebabkan hambatan dalam menyepakati definisi dan elaborasi hak-hak pekerja migran.

LAPORAN UTAMA 15

ASEAN BERSATU BERGERAK MAJU

NEWSRACK.PH

Pemimpin Negara Anggota ASEAN bertemu dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29 pada tanggal 6-8 September 2016 di Vientiane, Laos. Rangkaian KTT ini menjadi barometer terkait langkah ASEAN ke depan setelah didirikannya Masyarakat ASEAN. Isu-isu apa yang menjadi fokus dari para Pemimpin ASEAN? Bagaimana ASEAN memaknai upaya integrasinya yang terus diperdalam? Bagaimana ASEAN terus berupaya mengonsolidasikan hubungannya dengan mitra wicaranya?

Masyarakat ASEAN

LAPORAN KHUSUS 23

MASA DEPAN KONEKTIVITAS ASEAN

Setelah penandatanganan *Hanoi Declaration on the Adoption of the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)* pada tahun 2011, kondisi perekonomian ASEAN dinilai membaik. Aktivitas perdagangan di ASEAN dipandang semakin produktif, negara-negara ASEAN secara keseluruhan juga dipandang semakin berdaya saing. Namun pembangunan konektivitas ASEAN belum optimal. Agar implementasi MPAC lebih efektif, serta memberi gambaran ke depan mengenai peningkatan konektivitas, ASEAN sepakat untuk membentuk MPAC 2025. Kesepakatan ini telah diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan 29.

WAWANCARA 27
DJOKO MURJATMODJO
DIREKTUR OPERASIONAL DAN TEKNIK /PLT. DIREKTUR UTAMA ANGKASA PURA II

Integrasi ASEAN akan membuat kami masuk ke dalam suatu kompetisi dengan bandara-bandara lain di ASEAN, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada maskapai dan penumpang pesawat. Kami dapat ikut mendorong peningkatan industri pariwisata maupun industri lainnya. Kerja sama yang diupayakan di tataran regional ini dapat mendorong terwujudnya efektifitas dan efisiensi pada pelayanan transportasi udara.

REPORTASE 48
INDONESIA NOMINASIKAN KEPULAUAN SERIBU DAN WAKATOBI SEBAGAI *ASEAN HERITAGE PARKS*

Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Taman Nasional Wakatobi dinominasikan sebagai *ASEAN Heritage Parks* (AHP). Pengajuan tersebut merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung upaya ASEAN dalam memelihara dan mempromosikan kawasan konservasi, sesuai dengan *ASEAN Declaration on Heritage Parks and Reserves* tahun 1984.

SERBA SERBI 54
MEMBANGUN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA TANPA BATAS WILAYAH DI ASEAN

Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Sekretariat Regional pelaksanaan saling pengakuan tenaga profesional (*Mutual Recognition Arrangement -MRA*) di bidang pariwisata. Penunjukkan ini memberi beberapa keuntungan bagi sektor pariwisata Indonesia.

Bagi Anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui e-mail: buletinkomunitasasean@kemlu.go.id

Penanggung Jawab:
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
Jose Tavares

Penasehat
Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Ashariyadi

Pemimpin Redaksi
Andi Dirgahayu Yudyachandra

Dewan Redaksi
Bambang Witjaksono
Raden Hikmat Moeljawan
Mahmudin
Annie Yuliyanti

Staf Redaksi
Dara Yusilawati, Doddie Herado, Endang Susilowati, Falentino Arkhilaus Mara, Fatimah Alatas, I Made Diangga Adika Karang, Ika Annisaa Farista, Ivorry Chaka Nathara Pranashanti, Niwa Rahmad Dwitama, Rinnay N. Wahyunnisa, Susilo, Sylvia Masri, Bayu P. Oktavriyanto

Pemelihara Situs Web
Mizana Khusnu Perdani

Administrasi
Didi Suparyadi, Indyah Kusumawati, TB. M. Ramadhan, Wasana Adi Nugraha

Distribusi
Kasirun, Mulyanto, Tuwuh Ismail

Alamat Redaksi:
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri, Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat,
Telp. 021-3509050/021-3509059,
Fax. 021-3509050

Menerjemahkan Down to Earth Diplomacy dalam Isu Prioritas di Kawasan

Oleh:
J. S. GEORGE LANTU
Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada awal masa jabatannya menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya pemerintah akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang membumi (*down-to-earth)*. Kebijakan pemerintah harus dibuat berdasarkan permasalahan masyarakat luas dan oleh karena itu memberikan efek terhadap masyarakat luas pula.

Menteri Luar Negeri RI, Retno L. P. Marsudi, menerjemahkan visi kebijakan Presiden melalui *down-to-earth diplomacy*; upaya diplomasi yang tidak lagi mengawang-awang dan diibaratkan mengukir langit, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Dalam kaitan ini, Menlu mengatakan bahwa fokus kebijakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah menjaga kedaulatan wilayah NKRI, perlindungan warga negara Indonesia, diplomasi ekonomi, dan peningkatan peran Indonesia di kawasan dan dunia internasional.

Mengapa *migrant workers* dan *haze*?

Perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran (*migrant workers*) dan penanganan asap lintas batas (*haze*) memiliki karakteristik serupa: lintas batas, menyangkut hajat hidup masyarakat luas, serta dipandang secara berbeda oleh negara anggota ASEAN satu dengan lainnya. Karakteristik terakhir inilah yang membedakan keduanya dengan isu lainnya di bawah Pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Sebagai ilustrasi, negara-negara ASEAN mendukung kerja sama ASCC seperti pendidikan, kepemudaan, dan penanggulangan bencana dan semua sepakat bahwa isu-isu tersebut harus dimajukan dan diimplementasikan melalui kesepakatan bersama.

Sayangnya dalam isu *migrant workers* dan *haze*, tidak demikian. Masih terdapat perbedaan tajam antara negara pengirim dan penerima pekerja migran serta antara negara pemilik hutan yang terbakar dan yang bukan. Oleh karena itulah peran Kemlu sebagai ujung tombak negosiasi antar negara sangat diperlukan pada dua isu ini, setidaknya sampai tercapainya kesepakatan yang dapat diterapkan secara efektif di kawasan.

Perlindungan inklusif

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidato tahun 2015 di depan Majelis Umum PBB mengatakan bahwa dunia tengah mengalami masa terburuk krisis pengungsi dan migrasi manusia, baik yang disebabkan konflik bersenjata maupun alasan ekonomi. Di ASEAN, migrasi didominasi oleh mereka yang berlalu-lintas untuk alasan ekonomi, para pekerja migran.

Keberadaan pekerja migran di kawasan ASEAN sesungguhnya memiliki peran penting dilihat dari perspektif ekonomi, di mana migrasi populasi usia produktif untuk bekerja di wilayah negara lain merupakan suatu bentuk redistribusi sumber daya manusia yang berperan besar dalam produksi barang dan jasa di kawasan. Dalam hal ini, negara-negara pengirim pekerja migran yang memiliki surplus sumber daya manusia terbantu dalam menyediakan sumber penghidupan bagi warganya, sedangkan negara-negara penerima pekerja migran yang umumnya memiliki surplus modal dapat mempertahankan roda ekonominya dengan kehadiran tenaga kerja siap pakai, yang sering kali lebih efisien (kalau tidak ingin dikatakan murah) daripada menggunakan tenaga lokal. Indonesia dalam hal ini merupakan negara yang memiliki peran lebih condong sebagai salah satu negara pengirim bersama Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Laos.

Namun demikian, di samping peran pentingnya, migrasi pekerja antar negara di kawasan ASEAN ternyata menimbulkan efek luas dan signifikan di tatanan sosial-budaya, mulai dari benturan-benturan kebudayaan, pelanggaran hak-hak pekerja, merebaknya perdagangan manusia, hingga kasus kriminal di negara penerima. Efek sosial inilah yang terwujud dalam kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran asal Indonesia, yang berkaitan dengan hak-hak para pekerja migran yang tidak terlindungi di negara tempat bekerja. Mulai dari gaji yang tidak sesuai ketentuan, jam kerja yang berlebih dan tidak adanya jatah cuti, penahanan dokumen imigrasi oleh majikan, penipuan hubungan kerja, hingga ke kejadian-kejadian pelecehan dan penyiksaan.

Indonesia menyadari bahwa untuk meminimalisir kasus-kasus tersebut diperlukan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Indonesia menekankan bahwa ASEAN perlu menyepakati instrumen perlindungan yang mengikat secara hukum (*legally binding*), inklusif tanpa membedakan status keimigrasian, menghormati hak-hak keluarga pekerja migran, serta melindungi secara penuh saat pekerja berada di negara tempat bekerja.

Namun, di saat yang sama Indonesia menyadari bahwa terdapat tantangan besar untuk mewujudkan hal tersebut. Tantangan pertama adalah tidak adanya *political will* dari negara-negara ASEAN lainnya, terutama yang berstatus penerima pekerja migran, untuk menyediakan perlindungan dan pemajuan terhadap hak-hak para pekerja migran.

Sebagai contoh, bagi Malaysia, tunduk pada instrumen perlindungan dan pemajuan terhadap hak-hak pekerja migran berarti tambahan beban jaminan terkait hubungan ketenagakerjaan untuk lebih kurang dua juta pekerja asal Indonesia di wilayahnya. Tantangan kedua adalah banyaknya pekerja migran yang masuk secara *ilegal* sehingga dianggap lebih sebagai pelaku kejahatan imigrasi dibandingkan korban perdagangan manusia. Status *illegal* ini juga menyulitkan perlindungan hak-hak pekerja karena dokumen yang digunakan seringkali tidak sesuai kenyataan atau bahkan tidak ada sama sekali. Tantangan berikutnya adalah pekerja informal tidak dianggap sebagai pekerja migran karena seringkali dipekerjakan tanpa kontrak yang jelas dan detail. Selain itu, penghormatan atas hak keluarga pekerja migran dan jaminan perlindungan di negara penerima juga masih belum jelas.

Mengetahui fakta-fakta tersebut, bukan berarti Kemlu berhenti untuk berusaha menyediakan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Justru sebaliknya, Kemlu menghadirkan upaya-upaya tanpa henti baik melalui negosiasi dengan sesama negara anggota ASEAN maupun melalui kegiatan-kegiatan bersifat edukatif bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan penting dan positifnya perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran.

Peran Indonesia di Kawasan

Indonesia di ASEAN juga menghadapi isu penting terkait lingkungan hidup, yaitu asap lintas batas (*transboundary haze pollution*). Posisi sulit dialami oleh Indonesia dalam isu *haze* ini karena terdapat 'salah urus' lahan selama puluhan tahun sehingga masyarakat

BANTUANHUKUM.OR.ID

dan perusahaan begitu terbiasa mengolah lahan dengan cara membakar. Asap hasil pembakaran lahan inilah yang akhirnya terbawa angin dan mencapai wilayah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Meskipun Indonesia bukan merupakan satu-satunya negara di ASEAN dengan kebiasaan mengolah lahan dengan cara dibakar, fakta bahwa Indonesia memiliki lahan paling luas dan kegiatan perkebunan paling intensif menambah sulit posisi dalam hubungan dengan negara lain di ASEAN dalam isu ini.

Posisi sulit ini tidak membuat Indonesia kemudian bersifat *defensive* dalam hubungan dengan negara-negara lain di ASEAN. Indonesia menyadari potensi lebih besar yang dihasilkan dari membuka diri untuk kerja sama penanganan asap lintas batas ini. Karena itulah, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya menandatangani dan telah meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian ini, Indonesia bahkan telah bersedia menjadi *host country* untuk *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC)* yang menjadi pusat koordinasi upaya-upaya penanggulangan asap lintas batas.

Kemlu saat ini terus terlibat dalam negosiasi dalam kerangka *Conference of Parties (COP) to AATHP* yang merupakan satu-satunya forum pembahasan isu asap lintas batas di bawah ASCC. Hal-hal yang masih perlu disepakati antara lain terkait operasionalisasi ACC yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2018. Operasionalisasi tersebut juga mencakup pemberian bantuan oleh sesama negara ASEAN, di mana Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya berusaha memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan harus efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan asap lintas batas.

ASCC: *people-centered, people-oriented*

Asia Tenggara sebagai kawasan berkembang yang padat penduduk –628,9 juta penduduk menurut *ASEAN Statistics Leaflet 2016*– sewajarnya memilki perhatian besar pada isu-isu sosial-budaya yang notabene berorientasi masyarakat dan berefek langsung terhadap masyarakat. Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*) yang terbentuk sejak akhir 2015 merupakan sebuah wadah interaksi, kerja sama, sekaligus pemecahan masalah antar negara Asia Tenggara untuk isu-isu sosial-budaya.

ASCC sebagaimana tercantum dalam dokumen *ASEAN Forging Ahead 2025* adalah sebuah *people-centered, people oriented community that engages and benefits its people and is inclusive, sustainable, resilient and dynamic*. Melibatkan dan menguntungkan masyarakat, inklusif, berkelanjutan, tangguh dan dinamis; sebuah penjabaran yang sangat cocok dengan *down-to-earth diplomacy* yang diterapkan oleh Kemlu, sebuah justifikasi yang *valid* untuk terus memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam dua isu prioritas di dalamnya.●

PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN:

TINJAUAN *ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION OF HUMAN RIGHTS 2016*

Oleh: **DINNA WISNU, PH.D**
Wakil Indonesia untuk *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* 2016-2018

KEMLU.GO.ID

Suasana pertemuan konsultasi AICHR yang berlangsung di Jakarta, September 2016.

Tahun 2016 adalah tahun keketuaan Laos. Meskipun ini kali kedua Laos menjalankan tugas sebagai Ketua di ASEAN, setelah dulu pernah menjadi ketua pada tahun 2004, terasa ada harap-harap cemas tentang peranan Laos di dalam perkumpulan negara-negara Asia Tenggara ini. Setidaknya ada tiga alasan untuk itu.

Pertama, tahun ini adalah tahun pertama implementasi Visi Masyarakat ASEAN 2025, sekaligus juga tahun pertama ASEAN berjalan bersama-sama secara resmi dalam wadah Masyarakat ASEAN. Apakah Laos mampu mendorong lahirnya komitmen-komitmen baru yang menjembatani langkah konkrit dari komitmen Masyarakat ASEAN, khususnya di bidang Hak Asasi Manusia (HAM)?

Kedua, Laos mendapat sorotan tajam di mata dunia karena sejumlah praktek sosial politik di negara itu yang menekan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap HAM. Apakah Laos mau mendorong penguatan mandat A*SEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*?

Keketuaan ASEAN dan Laos

Pada tahun 2016, ASEAN genap berusia 49 tahun dan menjelang ulang tahun emas ASEAN ini para negara-negara anggota ASEAN memantapkan langkah untuk terus berjalan bersama sebagai suatu komunitas tunggal dalam menghadapi persaingan ekonomi dan tekanan-tekanan politik global. Dokumen Piagam ASEAN (*The ASEAN Charter)* yang ditandatangani pada 15 Desember 2008 di Jakarta adalah pengikat komitmen tersebut. Lebih lanjut dalam Deklarasi Kuala Lumpur tahun 2015 lahir pula kesepahaman untuk "maju bersama" (*forging ahead together)* di tengah medan geostrategis yang terus berubah sambil menjaga peran ASEAN sebagai pendorong utama dalam arsitektur kawasan yang berkembang.

ASEAN telah banyak berubah sejak awal tahun 2000. Tercatat, jumlah pertemuan di ASEAN bertambah, tak kurang dari 1.600 sidang per tahun, demikian pula isu-isu yang dikelola oleh ASEAN makin kompleks. Di bidang ekonomi telah muncul keinginan di kalangan elit untuk tidak saling bersaing sebagai tetangga tetapi saling melengkapi dengan mengembangkan pasar dan basis produksi industri yang tunggal di ASEAN. Upaya bersama ini selain ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bersaing di tingkat global juga digunakan untuk memperkuat daya tarik investasi asing ke kawasan Asia Tenggara.

Upaya di bidang ekonomi ini memunculkan pula penguatan komitmen di bidang politik keamanan dan sosial budaya. Di antara komitmen bersama tersebut adalah target untuk mewujudkan penghormatan pada HAM melalui dibentuknya AICHR pada tahun 2009. Ini merupakan langkah signifikan dari ASEAN mengingat bahwa di tahun 1980-1990-an para kepala pemerintahan di sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura menolak untuk menerapkan prinsip Barat dalam berdemokrasi dan menghormati HAM. Piagam ASEAN memuat kata HAM sebanyak tiga kali dan pasal 14 dari Piagam tersebut menjadi dasar pembentukan badan HAM di ASEAN di mana Kerangka Acuan alias *TOR (Terms of Reference)* untuk badan HAM tersebut diputuskan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

ASEAN SECRETARIAT

Pertemuan AICHR dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientiane Laos, 23 Juli 2016.

Namun komitmen pembentukan AICHR menuai sejumlah kritik. Pertama, karena TOR AICHR dianggap membatasi kerjasama pemajuan HAM antar negara anggota ASEAN karena prinsip non-intervensi dalam TOR tersebut. Kedua, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dari berbagai negara mengkritik AICHR kurang terbuka pada masyarakat sipil. Ketiga, AICHR tidak memiliki mandat untuk membantu korban pelanggaran HAM dan menangani kasus apalagi melakukan kunjungan antar negara yang sifatnya investigasi. Mandat AICHR lebih banyak ditekankan pada pembangunan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang HAM dan belum pada perlindungan HAM. Keempat, para komisioner bertanggung jawab pada unsur pemerintah yang menunjuk keanggotaan mereka di AICHR sehingga selain diragukan independensi pengambilan keputusannya juga para komisionernya rentan diganti bila terjadi perubahan pemerintah atau berseberangan pendapat dengan pemerintah yang berkuasa. Sriprapha Petcharamesree yang pernah menjabat sebagai komisioner AICHR pertama dari Thailand bahkan mengatakan,"…infrastruktur HAM ASEAN terbilang cacat (*full of defects*) sehingga tidak efektif".

Itu sebabnya isu penguatan mandat AICHR menjadi agenda penting tiap awal tahun. Termasuk di tahun 2016 di mana dari dalam AICHR ada desakan dari sejumlah komisioner, termasuk Indonesia, untuk meminta agar TOR AICHR ditinjau dan diperkuat pada mandat perlindungan HAM-nya. Sejumlah komisioner lain memilih diam. Ada juga yang mengatakan bahwa mandat pemajuan HAM belum dimaksimalkan oleh AICHR. Sisanya secara terbuka menolak. Patut diketahui bahwa permintaan untuk *review* TOR itu belum pernah berhasil disepakati oleh AICHR untuk disampaikan kepada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dalam hal ini punya jalur untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Negara.

Selain dari agenda tersebut, AICHR juga dituding menutup diri dari mata publik. Pengambilan keputusan dan kegiatan AICHR tidak dibuka kepada publik dan hanya sejumlah komisioner saja yang terbuka kepada jaringan masyarakat sipil serta rajin mengikuti undangan-undangan kegiatan pemajuan HAM di negaranya dan di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu AICHR di tahun 2016 juga mendorong agar laporan kegiatan AICHR dapat dipublikasikan kepada publik melalui *website* AICHR. Lagi, sejumlah negara termasuk Indonesia mendorong publikasi kegiatan AICHR, sementara beberapa yang lain memilih untuk diam atau menyatakan bahwa keputusan seperti itu bukanlah di tangan para komisioner AICHR melainkan harus diputuskan di tataran pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

Hal ini mencerminkan pentingnya peran Ketua dalam sidang-sidang AICHR. Menjadi Ketua di ASEAN punya sejumlah tanggung jawab dan makna. Secara prosedural, sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN pasal 31, menjadi Ketua ASEAN adalah kewajiban yang bersifat bergilir sesuai urutan alfabet dalam bahasa Inggris dari negara-negara anggota ASEAN. Yang menjadi Ketua akan memimpin rangkaian sidang dan Konferensi Tingkat Tinggi pada tahun dimana negaranya memimpin. Makna dari menjadi Ketua ASEAN adalah bahwa negara bersangkutan berperan penting dalam menjembatani segala perbedaan pendapat dan prioritas negara-negara anggota ASEAN. Negara yang menjadi Ketua di ASEAN akan pula mengetuai sidang-sidang dalam organ ASEAN seperti AICHR dan di badan-badan sektoral ASEAN lainnya.

Duduk bersama dalam suasana yang riuh dengan perbedaan pendapat bukanlah hal mudah. Hal ini terasa dalam keketuaan Laos. Dibutuhkan kecermatan untuk menangkap alasan perbedaan pendapat, apakah prosedural atau prinsipiil, apakah kontras atau tipis, apakah perlu mengundang pandangan tambahan dari peserta rapat ataukah ditutup, apakah perlu ditunda pengambilan keputusannya ataukah disimpulkan saja.

Dalam masa keketuaan Laos 2016, AICHR berhasil mencapai konsensus

untuk memajukan dua isu utama kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, atau AMM (*ASEAN's Foreign Ministers Meeting*), di bulan Juli 2016 yang kemudian tertuang dalam *Joint Communique* ke-49 dari Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Dua hal tersebut adalah rekomendasi untuk mempublikasikan Laporan Tahunan AICHR 2016 dengan mengunggahnya ke *website* demi menggalang peningkatan pemahaman publik ASEAN tentang HAM dan untuk meninjau ulang Kerangka Acuan Kerja, atau TOR (*Terms of Reference*), AICHR untuk memperkuat fungsi pemajuan dan perlindungan HAM.

Konsensus ini bukan masalah sederhana. Di dalam dan di luar sidang, komisioner dari negara-negara yang menolak publikasi laporan AICHR dan penguatan mandat AICHR melakukan tekanan kepada mereka yang mendukung. Untuk Laporan Tahunan AICHR, sebenarnya desakannya adalah agar seluruh laporan kegiatan AICHR sejak berdiri di tahun 2009 bisa dibuka kepada publik. Hal ini dianggap akan menguatkan pemahaman masyarakat akan HAM. Tetapi kubu yang menolak mengatakan bahwa laporan tersebut ditulis untuk konsumsi internal; sebagai rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri saja. Kalaupun akan didorong untuk dipublikasikan kepada publik, permintaannya adalah agar diputuskan oleh forum Menteri Luar Negeri ASEAN. Sayangnya mereka bahkan membatasi agar permintaan tersebut sebatas publikasi Laporan Tahunan AICHR 2016. Setelah tarik ulur dalam beberapa kali sidang dapat disadari bahwa posisi Ketua sangat menentukan pilihan kata dalam rekomendasi kebijakan oleh AICHR.

Untuk permintaan peninjauan TOR AICHR, kalimat yang akhirnya keluar dari AICHR adalah sebagai berikut: *"In light of new developments such as the adoption of the ASEAN Community Vision 2025, especially the APSC Blueprint 2025, the AICHR recommends that the AMM consider,* ***as and when appropriate****, a review of the AICHR's TOR in accordance with the Article 9.6 of the TOR to further enhance the promotion and protection of human rights of the peoples of ASEAN, consistent with the purposes and principles of the ASEAN Charter."*

Suasana pertemuan AICHR yang berlangsung di gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, April 2016.

Kata ***"as and when appropriate"*** menjadi penanda sulitnya mencapai konsensus dalam isu ini. Sementara itu untuk publikasi Laporan Tahunan AICHR hanya disebutkan untuk Laporan Tahunan AICHR 2016.

Pemajuan dan Perlindungan HAM

Sebenarnya ada banyak isu yang dibahas di dalam AICHR seperti terkait perlindungan pekerja migran, pengarusutamaan hak-hak kaum disabilitas, perempuan dan anak, menumpas perdagangan manusia, menjamin akses bantuan hukum, hingga pengaturan bisnis dalam melakukan *community social responsibility* agar menjamin perlindungan HAM. Namun memang ada keterbatasan yang mendasar di AICHR terkait interpretasi atas mandat para komisioner.

Masih cukup banyak komisioner yang melihat AICHR lebih sebagai wadah melakukan kegiatan pelatihan, seminar atau lokakarya serta menghubungkan AICHR dengan mekanisme HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di belahan dunia lain. Fungsi responsif kepada kebutuhan-kebutuhan mendesak pada korban pelanggaran HAM justru belum tersentuh. Kalaupun ada, karena sulit dilakukan konsensus terpaksa para komisioner yang peduli akan melakukan kegiatan di tingkat nasional saja dengan mengundang para komisioner yang simpati.

Laos sebagai Ketua di tahun 2016 memang berhasil membawa 2 agenda penting terkait transparansi kegiatan AICHR dan penguatan mandat AICHR, tentunya ini karena kegigihan para komisioner yang mendukung agenda tersebut, tetapi karena pilihan kata yang diambil terbatas pada Laporan Kegiatan 2016 dan permintaan penguatan mandat AICHR diserahkan waktunya kepada Forum Menteri Luar Negeri tanpa penjelasan lebih lanjut maka dampak positif Laos kepada AICHR sebagai Ketua termasuk terbatas. Inilah salah satu gambaran betapa prosedur di ASEAN melambatkan langkah untuk membuat ASEAN lebih responsif pada kebutuhan kelompok-kelompok yang sangat membutuhkan, seperti para korban pelanggaran HAM.●

KEMLU DAN PEMKAB SUMBAWA TEGASKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, khususnya Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN (KFA) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, hari Jumat (22/7) menyelenggarakan konsultasi publik bertema "Upaya Peningkatan Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran di ASEAN". Melalui konsultasi publik ini, Direktorat KFA berusaha meningkatkan *awareness* dan pemahaman para pemangku kepentingan di daerah, sampai pada tingkat masyarakat/komunitas, mengenai pentingnya perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran di ASEAN.

"Perlindungan warga negara Indonesia selalu menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Dalam kaitan dengan kawasan Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri berupaya melaksanakan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran di ASEAN," kata Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN Kemlu, J. S. George Lantu di Sumbawa.

DITJEN KERJA SAMA ASEAN

Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN dalam acara talk show di radio Rasesa FM Sumbawa, membahas mengenai Upaya Peningkatan Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran di ASEAN.

Sumbawa merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbanyak di Indonesia. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, pengiriman tenaga kerja dari Sumbawa paling banyak dilakukan ke negara-negara di wilayah Timur Tengah. Sementara itu, ASEAN menempati posisi kedua tujuan pengiriman, terutama karena banyaknya warga Sumbawa yang bekerja di Malaysia.

Konsultasi publik yang mengambil tempat di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten dan inspiratif di bidang perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran, yaitu Direktur KFA Kemlu RI, J. S. George Lantu; Komisioner Indonesia untuk Komite ASEAN Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC), Yuyum F. Paryani; dan pakar ASEAN dan Uni Eropa dari *the Asia Consulting*, Rennie Roos. "Kita harus dapat melihat bahwa persoalan pekerja migran berdampak luas, termasuk terhadap anak-anak. Terdapat anak-anak yang ditinggalkan di kampung halaman oleh para pekerja migran dan juga anak-anak pekerja migran yang lahir di luar negeri," demikian disampaikan Yuyum dalam paparan konsultasi publik.

Sementara itu, Rennie Roos mengatakan bahwa ada hal-hal yang dapat dicontoh oleh ASEAN dari Uni Eropa dalam hal hak-hak pekerja migran, dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kekhasan masyarakat Asia Tenggara.

Konsultasi publik ini merupakan kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan kerja sama Kemlu dengan Pemkab Sumbawa untuk topik perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Pada Kamis (21/7) diadakan pula dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan yang secara langsung terlibat dalam pengiriman pekerja migran, dan siaran langsung *talk show* di radio Rasesa FM Sumbawa.●

BAYU P. OKTAVRIYANTO/ DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

BAGAIMANA INDONESIA MEMPERJUANGKAN HAK PEKERJA MIGRAN DI ASEAN?

Tahukah Anda bahwa lebih dari lima setengah juta pekerja migran berada di kawasan Asia Tenggara? Tiga juta diantaranya adalah tenaga kerja Indonesia (Sumber: Kemnaker, 2015). Apa yang dilakukan oleh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk menjamin perlindungan hak para pekerja migran? Bagaimana Indonesia memperjuangkan hak para pekerja migran di ASEAN?

Pada tahun 2007, para pemimpin ASEAN telah menghasilkan *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina. Deklarasi tersebut memuat kewajiban bagi negara pengirim, negara penerima maupun kewajiban ASEAN sebagai kerja sama regional untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut, para Menteri Luar Negeri ASEAN memutuskan untuk membentuk *ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW)*.

Untuk menjamin perlindungan terhadap para pekerja migran, *ASEAN berupaya menyusun ASEAN Instrument on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers*. Untuk menyusun instrument tersebut, ACMW membentuk *ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Migrant Workers Drafting Team (ACMW-DT)*. Hingga kini, penyusunan instrumen telah dibahas dalam 15 kali pertemuan ACMW-DT dan 2 kali *special meeting* namun masih belum menghasilkan suatu instrumen yang dapat menjadi acuan perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran di ASEAN.

Faktor apa sajakah yang menyebabkan pembahasan menjadi berlarut-larut? Bagaimana dengan posisi Indonesia dalam pembahasan tersebut? Dalam pembahasan penyusunan instrumen pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran di ASEAN, terdapat tiga prinsip utama yang masih diperdebatkan yaitu *legal nature of the instrument*, perlindungan terhadap *documented dan undocumented migrant workers*, serta perlindungan bagi anggota keluarga para pekerja migran.

TRUST.ORG

Para tenaga kerja migran asal Indonesia tengah menunggu keberangkatan ke Timur Tengah.

Dalam hal ini, Indonesia terus mendorong kelanjutan perumusan *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* agar instrumen tersebut bersifat *legally binding*, memberikan perlindungan bagi para pekerja migran di kawasan tanpa membeda-bedakan status (*legal/illegal, documented/undocumented, skilled/unskilled)* serta perlindungan bagi anggota keluarga pekerja migran.

Indonesia memperjuangkan agar instrumen bersifat *legally-binding* mengingat perlindungan hak-hak TKI hanya dapat dilakukan secara efektif melalui pembentukan kerangka hukum regional. Dalam hal ini, posisi Indonesia sejalan dengan Filipina, namun karena desakan dari publik domestik, Filipina cenderung untuk berkompromi dengan mendukung instrumen bersifat *non-legally binding* dengan mengajukan empat syarat sebagai berikut: penyusunan *action plan* sesegera mungkin dengan *timelines* implementasi instrumen; negosiasi bilateral perjanjian tenaga kerja antar negara anggota ASEAN untuk mendukung implementasi instrumen, *sharing and documentation best practices*, dan penunjukan *focal point* nasional untuk implementasi instrumen di setiap negara Anggota ASEAN.

Sementara itu posisi Indonesia berseberangan dengan negara penerima pekerja migran seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam yang cenderung menginginkan agar instrumen bersifat *non-legally binding*. Karena pembahasan penyusunan instrumen telah berlangsung berlarut-larut sejak tahun 2008, Thailand mengusulkan instrumen bersifat *non-legally binding* namun menyarankan agar negara anggota ASEAN dapat mempertimbangkan kemungkinan menjadi *legally-binding* di kemudian hari.

Dalam kaitannya dengan *protection of the rights of migrant workers*, Indonesia menginginkan agar cakupan perlindungan tidak membeda-bedakan pekerja migran. Dalam pembahasan, masih terdapat perbedaan pandangan antara perlindungan menyeluruh (termasuk untuk *undocumented migrant workers*) dan perlindungan hanya kepada *documented migrant workers*. Hal ini menyebabkan hambatan dalam menyepakati definisi dan elaborasi hak-hak pekerja migran.

Dalam hal pembahasan *protection of fundamental rights and dignity of family members,* Indonesia berpandangan bahwa instrumen tersebut seyogyanya juga mencakup perlindungan hak-hak anggota keluarga pekerja migran sebagaimana telah disebutkan oleh para *ASEAN Leaders* dalam *Cebu Declaration*, 2007. Namun, Malaysia tetap bersikeras agar instrumen tidak mencakup perlindungan anggota keluarga pekerja migran.

ASEAN Labour Ministers Meeting ke-24 pada tanggal 10-16 Mei 2016 telah memutuskan *timeline* penyelesaian instrumen yaitu September 2016 atau paling lambat April 2017. Pada pertemuan *ASEAN Senior Labour Officials' Special Meeting to Finalise the Draft ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* tanggal 1-3 September 2016 di *ASEAN Secretariat*, Jakarta, pertemuan kembali gagal mencapai kesepakatan dalam pembahasan tiga isu prinsip utama dan sebelas pasal terkait. Indonesia menegaskan kembali perlunya instrumen yang *legally binding* bagi pekerja migran dan anggota keluarganya, serta instrumen yang melindungi *documented* dan *undocumented workers*. Indonesia juga menyampaikan tidak akan berkompromi pada tiga isu prinsip utama tersebut. Bagi Indonesia, ASEAN lebih baik tidak memiliki dokumen daripada menghasilkan dokumen yang tidak memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi tenaga kerja Indonesia.●

FATIMAH ALATAS/DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

ASEAN.ORG

Para pemimpin negara ASEAN berfoto bersama kepala negara RRT pada acara KTT ke-19 ASEAN-RRT, di Vientiane Laos.

25 TAHUN KERJA SAMA KEMITRAAN ASEAN-RRT

Apakah yang terlintas di kepala kita ketika mendengar hubungan ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)? Jika yang terpikirkan hanyalah isu Laut China Selatan (LCS), maka kita perlu mengenal lebih jauh lagi hubungan istimewa yang telah terjalin selama seperempat abad antara ASEAN dan RRT ini.

ASEAN dan RRT mulai menjalin kerja sama sejak tahun 1991 yang kemudian diresmikan secara formal pada tahun 1996. Tahun ini, 25 tahun kerja sama kemitraan ASEAN-RRT diperingati melalui berbagai program kegiatan, dengan penyelenggaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-19 ASEAN-RRT di Vientiane, Laos pada tanggal 7 September 2016 sebagai puncaknya. KTT yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Laos, H.E. Thongloun Sisoulith, sebagai Ketua ASEAN 2016, ini dihadiri oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN dan PM RRT, H.E. Li Keqiang, serta Sekretaris Jenderal ASEAN. Prosesi Peringatan 25 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-RRT pada KTT ke-19 ASEAN-RRT ini ditandai dengan penayangan film dokumenter singkat dan peluncuran buku kecil Fakta dan Angka terkait kerja sama kemitraan ASEAN-RRT yang dibuat oleh RRT. Dalam KTT ini dihasilkan juga suatu pernyataan bersama (*Joint Statement of the 19th ASEAN-China Summit to Commemorate the 25th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations*) yang menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis ASEAN-RRT.

Dalam 25 tahun terakhir, berbagai kemajuan signifikan dalam kerja sama saling menguntungkan antara ASEAN dan RRT telah dicapai di berbagai bidang. Dalam kerja sama ekonomi misalnya, RRT dapat terus mempertahankan posisinya sebagai mitra dagang terbesar ASEAN dengan nilai total perdagangan bilateral mencapai USD 346,4 miliar (2015). Di tahun yang sama, aliran Penanaman Modal Asing (PMA) dari RRT ke ASEAN yang mencapai USD 8,2 miliar juga telah menjadikan RRT sebagai sumber PMA terbesar ke-empat ASEAN. Momentum ini semakin memperkuat semangat untuk mencapai *twin goals* perdagangan dan investasi dua arah ASEAN-RRT sebesar USD 1 triliun untuk perdagangan dan USD 150 miliar untuk investasi pada tahun 2020. Pencapaian target tersebut akan menjadikan ASEAN sebagai mitra dagang dan investasi terbesar bagi RRT, melampaui Amerika Serikat dan Uni Eropa.

ASEAN dan RRT juga berkomitmen untuk mengintensifkan negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* sehingga dapat difinalisasi pada pertengahan tahun 2017. Penguatan daya saing UMKM ASEAN-RRT dalam *supply chains* juga diupayakan bersama melalui kesepakatan *Joint Statement between ASEAN and China on Production Capacity Cooperation* yang lebih jauh akan mendorong kepercayaan diri dan keterlibatan bisnis negara anggota ASEAN dan RRT.

Isu lain yang juga menjadi perhatian besar saat ini adalah konektivitas. ASEAN mendorong RRT untuk terus mendukung peningkatan konektivitas di dalam ASEAN dan kawasan melalui skema *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025* yang diadopsi pada KTT Ke-28 ASEAN sehari sebelumnya. Terkait hal ini, RRT menjanjikan dana sebesar RMB 200 juta (USD 33 juta) dari *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* untuk proyek pembangunan infrastruktur di Asia, termasuk negara-negara ASEAN. RRT juga akan memberikan bantuan keuangan sebesar USD 5 juta untuk merealisasikan program kerja sama kemitraan ASEAN-RRT periode tahun 2017-2020, serta RMB 50 juta (USD 8,3 juta) untuk pembangunan kawasan industri di ASEAN.

Dari kerja sama kemitraan ASEAN-RRT bidang sosial-budaya, khususnya terkait *people-to-people interaction*, tercatat sekitar 13 juta atau 12,4% warga RRT berkunjung ke ASEAN dan sekitar 6,1 juta turis asal ASEAN berkunjung ke RRT. Tingginya animo warga RRT dalam berwisata ke ASEAN membuat kedua belah pihak menetapkan target 30 juta wisatawan RRT akan berkunjung ke ASEAN hingga tahun 2020. Masih dalam semangat ini, ASEAN dan RRT mendukung penetapan tahun 2017 sebagai Tahun Kerja Sama Pariwisata ASEAN-RRT (*ASEAN-China Year of Tourism Cooperation*) yang diharapkan dapat mendorong kunjungan wisatawan dua-arah dan memperkuat hubungan antar masyarakat ASEAN dan RRT. *ASEAN-China Centre* di Beijing juga terus aktif berkontribusi tak hanya dalam memfasilitasi kerja sama pariwisata namun juga perdagangan, investasi, pertukaran pendidikan dan budaya antara ASEAN dan RRT.

Tak hanya itu, ASEAN-RRT juga bekerja sama dalam bidang alih teknologi melalui *ASEAN-China Science and Technology Partnership Program (STEP)* yang diluncurkan tahun 2012. Ada juga *ASEAN-China Technology Transfer Center* yang berkontribusi dalam memfasilitasi *information sharing, resource matchmaking*, dan berbagai kegiatan yang mendorong kolaborasi antar perusahaan dan *science parks* ASEAN dan RRT. Tahun 2016 juga merupakan *ASEAN-China Year of Educational Exchange* yang dicanangkan untuk meningkatkan kerja sama pendidikan antara ASEAN dan RRT. Berbagai program diantaranya seperti *9th ASEAN-China Education Cooperation Week* dan *2nd ASEAN-China Education Ministers Roundtable* telah diselenggarakan pada tanggal 1-7 Agustus 2016 dengan tema *"Education First, Make Dreams Come True Together"*.

Di bidang kesehatan, ASEAN dan RRT mengesahkan *Plan of Action of the ASEAN-China Memorandum of Understanding on Health Cooperation* yang melengkapi implementasi *ASEAN Post 2015 Health Development Agenda* tahun 2016-2020. Area prioritas kerja sama ASEAN-RRT di bidang ini meliputi pencegahan dan pengendalian baik terhadap penyakit menular maupun tidak menular; mekanisme tanggap darurat kesehatan publik dan kapasitas untuk mengurangi dampak kesehatan dari bencana alam; pengembangan sumber daya manusia untuk kesehatan; dan pengembangan obat tradisional. Selain itu, ASEAN-RRT juga mengadopsi *ASEAN-China Strategy on Environmental Cooperation* (2016-2020) untuk memperkuat kerja sama praktis kedua belah pihak dalam perlindungan lingkungan, perubahan iklim, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, perbaikan akses terhadap udara dan air bersih serta sanitasi.

Berbagai kerja sama ekonomi, sosial dan budaya antara ASEAN dan RRT ini sedikit-banyak telah berkontribusi dalam membentuk masyarakat di kedua wilayah selama 25 tahun hingga seperti sekarang ini. Tanpa kita sadari, mungkin pakaian yang kita kenakan, kendaraan yang kita naiki, hiburan yang kita nikmati, buku yang kita baca, obat yang kita konsumsi, buah yang kita sukai atau bahkan lapangan pekerjaan kita saat ini adalah hasil dari kerja sama kemi-

traan ASEAN-RRT, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sulit dibayangkan jika berbagai manfaat yang kita rasakan ini tidak dapat lagi dinikmati. Oleh sebab itu, kemitraan strategis ASEAN-RRT yang bermanfaat dan saling menguntungkan perlu untuk terus dijaga dan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak.

Tentu saja perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan, sebagai fondasi penting pembangunan ekonomi dan sosial-budaya yang kondusif, harus kuat terjaga. Dalam KTT ke-19 ASEAN-RRT sekaligus KTT Peringatan 25 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-RRT, Presiden RI Joko Widodo menyerukan bahwa Laut China Selatan tidak boleh menjadi ajang *"power projection"* kekuatan-kekuatan besar. Presiden menyebutkan kehadiran pihak eksternal dinilai dapat menghambat proses penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perdamaian dan keamanan berkelanjutan di LCS harus diciptakan melalui kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, serta upaya pihak yang bersengketa untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian secara damai. Untuk itu, Indonesia menyambut baik pengesahan *Joint Statement on the Application of the Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) in the South China Sea* dan Panduan Komunikasi *Hotline (Guidelines for Hotline Communications Among Senior Officials of the Ministries of Foreign Affairs of ASEAN Member States and China in Response to Maritime Emergencies in the Implementation of the Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea (DOC))* yang konsistensi pelaksanaannya dapat berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas keamanan di LCS.

ASEAN dan RRT sepakat mengenai pentingnya implementasi penuh dan efektif DOC dan penyelesaian sesegera mungkin *Code of Conduct (COC)*. Terkait hal ini, PM RRT Li Keqiang menyampaikan komitmen penuhnya terhadap penyelesaian implementasi *Early Harvest Measures* sampai akhir tahun 2016 dan penyelesaian konsultasi kerangka COC pada paruh pertama tahun 2017, serta percepatan proses konsultasi COC sebagaimana dituangkan dalam strategi *Four Visions* prakarsa RRT.

LCS merupakan kawasan maritim yang menjadi jalur utama perdagangan dengan nilai USD 5 triliun per tahun. Untuk itu, Indonesia menghimbau agar kerja sama maritim dapat ditingkatkan. Indonesia mendorong ASEAN dan RRT untuk mengimplementasikan secara nyata dan bermanfaat *East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* sebagai salah satu mekanisme regional yang dapat meningkatkan rasa saling percaya dan c*onfidence building measures* di LCS.

25 tahun kerja sama kemitraan ASEAN-RRT telah berhasil mempertahankan perdamaian dan keamanan di kawasan hingga saat ini. Kerja sama kemitraan ASEAN-RRT baik di pilar politik dan keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya masing-masing memiliki kontribusi positif. Ketiganya memegang peran yang sangat penting dan saling melengkapi dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat ASEAN dan RRT yang damai dan sejahtera. Momentum *silver jubilee* ini hendaknya dapat dihayati oleh kedua belah pihak untuk memegang teguh esensi dan tujuan dasar mengapa kemitraan ASEAN-RRT dibentuk.

Semuanya tak lain adalah agar masyarakat di kawasan dapat hidup bersama secara rukun dan harmonis dengan taraf hidup yang semakin baik, dan itu hanya dapat dilakukan selama kita mengedepankan *mood of cooperation* dibandingkan *mood of rivalries*.●

RINNAY NITRABENING WAHYUNNISA/
DIT. MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

ASEAN BERSATU BERGERAK MAJU

Didirikan ditengah ketegangan Perang Dingin dan pertarungan ideologi Timur dan Barat, ASEAN pada awal mulanya dibentuk sebagai asosiasi yang berfokus pada kerja sama ekonomi di antara negara anggotanya. Namun demikian, dinamika kerja sama di kawasan selama bertahun-tahun membawa ASEAN berkembang dari organisasi yang bersifat longgar (*loose*) menjadi organisasi yang berdasar pada aturan (*rules-based*), dengan diberlakukannya Piagam ASEAN sejak tahun 2008.

Selain itu, kerja sama ASEAN juga ditujukan untuk semakin berpusat dan berorientasi pada masyarakat, dimana kemudian timbulah gagasan untuk mentransformasi kerja sama ASEAN menjadi Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*), yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, dan bertanggung jawab secara sosial. Hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam pembagian kerja sama di tiga pilar yakni politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya, sesuai dengan kesepakatan *Bali Concord II* pada tahun 2003.

Selama 50 tahun terakhir, kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang relatif aman dan stabil dibandingkan kawasan lain. Namun dengan semakin meningkatnya peran ASEAN di dunia internasional dan perubahan geopolitik dan geoekonomi di kawasan, ASEAN terus diuji baik sebagai Masyarakat maupun sebagai sebuah organisasi regional. Sentralitas dan Kesatuan ASEAN yang selama ini menjadi mantra yang dijunjung oleh ASEAN mendapatkan ujian dari perubahan-perubahan tersebut.

Pertanyaan besarnya kemudian adalah bagaimana ASEAN mempertahankan persatuan dan sentralitasnya untuk menciptakan kemajuan pembangunan Masyarakat ASEAN itu sendiri?

HUMANRIGHTSINASEAN.INFO

Para kepala negara/pemerintahan ASEAN di KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN di Vientiane, Laos.

Tahun 2016 mengawali sejarah baru bagi ASEAN. Untuk pertama kali sejak dimulainya era Masyarakat ASEAN sejak akhir 2015 yang lalu, Pemimpin Negara Anggota ASEAN bertemu dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29 pada tanggal 6-8 September 2016 di Vientiane, Laos. Momentum ini merupakan kali keduanya bagi Laos untuk memegang keketuaan ASEAN setelah keketuaan Laos pada tahun 2004.

Rangkaian KTT tersebut bisa dikatakan akan menjadi barometer terkait langkah ASEAN ke depan setelah didirikannya Masyarakat ASEAN. Isu-isu apa yang akan menjadi fokus dari para Pemimpin ASEAN? Bagaimana ASEAN memaknai upaya integrasinya yang terus diperdalam? Bagaimana ASEAN akan terus berupaya mengonsolidasikan hubungannya dengan mitra wicaranya?

National Convention Center (NCC) di Vientiane, Laos menjadi saksi dari pertemuan akbar yang mempertemukan 10 Kepala Negara ASEAN dan 18 Kepala Negara anggota KTT Asia Timur atau *East Asia Summit (EAS)*. Pertemuan ini menghasilkan 57 *Outcome Document* dari ketiga pilar kerja sama Masyarakat ASEAN dan sebagai hasil dari rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-28 dan ke-29, KTT ASEAN dengan beberapa mitra wicaranya (Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Republik Korea dan RRT), KTT ASEAN-PBB, KTT Asia Timur dan KTT *ASEAN Plus Three (APT)*.

Hasil Penting KTT ASEAN dan Pertemuan Terkait

Menggarisbawahi tema mengenai ASEAN yang tangguh dan relevan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN untuk dapat menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa *flashpoint* di kawasan yang apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berpotensi menimbulkan konflik terbuka, seperti Laut China Selatan (LCS), situasi di Semenanjung Korea, dan keamanan di Laut Sulu, Filipina, dan sekitarnya. Indonesia terus menekankan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan. Dengan lebih dari 600 juta penduduk,

ASEAN harus dapat menjaga kesatuan dan sentralitasnya untuk menjadi kontributor keamanan dan stabilitas.

Isu ekonomi dan perlindungan pekerja migran juga menjadi tema penting yang diangkat Presiden RI dalam pertemuan KTT ASEAN. Dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang masih diatas rata-rata pertumbuhan dunia, yaitu 4,7% dalam dua tahun berturut-turut, kerja sama ekonomi harus dapat terus ditingkatkan dan menciptakan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat ASEAN. ASEAN harus dapat memprioritaskan UMKM melalui pengembangan teknologi dan inovasi serta perluasan akses keuangan dan pasar. Untuk dapat memajukan ekonomi bersama dan menjamin *"no one left behind"* negara anggota harus terus berupaya untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan di ASEAN. Dalam isu pekerja migran, Presiden RI mendorong agar ASEAN segera menyelesaikan Instrumen Pemajuan dan Perlindungan Hak Pekerja Migran.

Pada rangkaian KTT ASEAN ini, sebagai tanda penguatan kerja sama ASEAN di bidang *disaster management*, Kepala Negara ASEAN juga menandatangani Deklarasi *One ASEAN One Response (OAOR)*. Deklarasi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk upaya untuk memperkuat respon kolektif ASEAN terhadap bencana yang lebih cepat, mobilisasi sumber daya yang lebih besar dan membangun koordinasi yang lebih kuat. Negara anggota ASEAN terletak di bentang alam yang cukup rentan akan berbagai bencana alam. Deklarasi ini juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat peran ASEAN Co*ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center)*.

Beberapa isu strategis lain yang mengemuka dari hasil KTT ASEAN dengan para mitra wicaranya antara lain terkait penguatan kerja sama maritim, kerja sama deradikalisasi dan pencegahan ekstremisme, upaya untuk mendorong denuklirisasi di Semenanjung Korea, peningkatan kerja sama ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan.

Selain dari pada itu, Kepala Negara ASEAN juga mengadakan tiga pertemuan Tatap Muka (*Interface*) dengan wakil Parlemen, Pemuda dan ABAC. (*ASEAN Business Advisory Council*). Pertemuan *Interface* ini menegaskan peranan penting ketiga aktor tersebut dalam proses pembangunan Masyarakat ASEAN. Kolaborasi antara badan eksekutif dan legislatif akan mendukung ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan di kawasan dan mendukung upaya harmonisasi aturan di tingkat regional terhadap legislasi nasional negara anggota. Kepada perwakilan Pemuda ASEAN, Presiden RI menyampaikan pentingnya wadah yang dapat memberikan akses kepada pemuda untuk menyampaikan aspirasinya kepada para pembuat kebijakan. Sedangkan kepada sektor bisnis, Kepala Negara ASEAN mendukung upaya untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor swasta ASEAN agar dapat bersaing di pasar global.

ASEAN.ORG

Para pemimpin negara ASEAN saat menandatangani deklarasi *One ASEAN One Response*, di Vientiane Laos.

Sentralitas ASEAN mengelola perdamaian di kawasan

Rangkaian KTT ASEAN ke-28 dan ke-29 dan KTT Terkait Lainnya ini menarik perhatian dunia internasional. Pasalnya, rangkaian KTT ASEAN tersebut dilaksanakan ditengah intensnya perhatian komunitas internasional pasca keputusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* atas gugatan Fiilpina mengenai interpretasi *nine-dashed line* oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang resmi diumumkan pada tanggal 12 Juli 2016 yang lalu. ASEAN memilih untuk menjaga netralitasnya untuk tidak memihak dalam keputusan PCA tersebut. Melalui hal ini, terdapat beberapa pembelajaran menarik terkait bagaimana ASEAN menjaga kesatuan dan sentralitasnya menghadapi konflik LCS.

Pertama, ASEAN berfokus pada penciptaan keadaan kondusif dan mencegah eskalasi ketegangan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak *non-claimant states* di LCS. Melalui penciptaan kondisi yang kondusif tersebut, negara *claimant* diharapkan dapat menyelesaikan sengketa wilayah secara damai.

Kedua, Negara Anggota ASEAN telah memproyeksikan kesatuannya melalui pernyataan bersama Kepala Negara ASEAN di KTT ke-28 dan ke-29 dan Menlu ASEAN pada AMM ke-49. Dalam *Chairman's Statement* KTT ASEAN ke-28 dan ke-29, Pimpinan Negara Anggota ASEAN menyampaikan perhatian serius mereka atas perkembangan terakhir terkait reklamasi pulau dan eskalasi aktivitas di LCS yang telah mencederai kepercayaan dan meningkatkan ketegangan di kawasan.

Kepala Negara ASEAN menegaskan pentingnya mempertahankan perdamian, keamanan, stabilitas dan keselamatan serta kebebasan navigasi di LCS, pentingnya non-militerisasi dan *self-restraint*, serta penyelesaian secara damai sesuai hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Mereka juga menyerukan pentingnya implementasi penuh dan efektif dari *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* dan penyelesaian segera suatu *Code of Conduct (COC)* yang efektif. Pernyataan ini merupakan refleksi dari komitmen tinggi dari Kepala Negara untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Ketiga, sentralitas ASEAN bukanlah suatu hak yang didapatkan dengan sendirinya, melainkan suatu pengakuan yang harus dicapai. Melalui inisiatif dan diplomasi aktif Menlu RI di *ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)* ke-49, Negara Anggota ASEAN mencapai kesepakatan atas *Joint Statement on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region*. Pernyataan bersama ini menegaskan kembali komitmen ASEAN atas norma dan nilai ASEAN yang termaktub dalam Piagam ASEAN, *the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration*, dan *Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations* yang mengatur tata kelola kerja sama antar-negara di kawasan, termasuk dengan negara di luar ASEAN. Dengan demikian, sentralitas ASEAN dapat terjaga.

ASEAN bergerak maju

Salah satu hasil penting lain dari KTT ASEAN ke-28 dan ke-29 ini adalah aksesi Chile, Mesir dan Maroko kepada the *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* pada tanggal 6 September 2016. Dengan demikian, telah terdapat 35 negara (10 Negara Anggota ASEAN dan 25 Negara non-ASEAN) yang telah mengaksesi TAC sebagai prinsip-prinsip perdamaian dan stabilitas dalam mengelola relasi antar negara di kawasan. Kepala Negara ASEAN menyambut baik kemajuan dan kontribusi positif dari TAC yang terus mendapat dukungan dari negara-negara diluar ASEAN. Meningkatnya pengakuan internasional atas TAC juga berarti mempertegas pengakuan atas nilai-nilai ASEAN dalam memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Dalam bidang *Trafficking in Persons (TIP)*, Indonesia menyampaikan komitmen untuk dapat segera meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* pada tingkat Nasional. Pada saat ini, Kamboja, Singapura dan Thailand telah meratifikasi ACTIP dan untuk implementasi efektif, konvensi tersebut harus terlebih dahulu diratifikasi oleh setidaknya enam negara anggota. Melalui KTT ASEAN, Pimpinan negara menyatakan komitmen tinggi untuk menanggulangi perdagangan manusia di kawasan.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah isu perlindungan pekerja migran. Kepala Negara Anggota ASEAN mencatat keputusan *ASEAN Labour Ministers' Meeting (ALMM)* ke-24 pada 15 Mei 2016 untuk memfinalisasi *draft* instrumen ASEAN dalam hal perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran. Sebagai sektor penting dalam pembangunan kesejahteraan Masyarakat ASEAN, instrumen ASEAN ini akan menjamin terlindunginya hak-hak pekerja migran. Indonesia akan terus mengawal dan mengadvokasikan penyelesaian segera dari Instrumen ASEAN untuk perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran.

Beberapa capaian yang dihasilkan dari KTT ASEAN ini merupakan pengejawantahan dari kemajuan yang telah dicapai ASEAN. ASEAN bergerak maju berdasarkan *"level of comfort"* setiap negara anggota sehingga prinsip "*no one left behind*" dapat terjaga. Hal ini berarti bahwa suatu kerja sama dalam kerangka ASEAN harus dapat memberikan keuntungan dan kontribusi positif bagi pembangunan setiap negara anggotanya. ASEAN bergerak maju dengan bersatu.

Sebagai soko guru atau *the cornerstone* dari politik luar negeri, Indonesia harus terus memproyeksikan kepemimpinannya dalam menjaga sentralitas ASEAN demi terciptanya perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. Kontribusi aktif Indonesia akan terus mengawal proses pembangunan Masyarakat ASEAN yang lebih *rules-based, people-centred* dan *people-oriented*. Senada dengan kutipan Menlu RI pada Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2016: "Bersama Indonesia, ASEAN akan kuat, Bersama ASEAN, Indonesia akan maju".●

NIWA RAHMAD DWITAMA, YUDHA VIRWANTO BAGUS TRIADI/DIT. POLITIK KEAMANAN ASEAN

MITRA WICARA ASEAN PERTEGAS KOMITMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP MASYARAKAT ASEAN

Tahun 2016 menjadi tahun pertama bagi ASEAN setelah diresmikannya Masyarakat ASEAN pada 31 Desember 2015. Sebagai tahun pertama, tahun 2016 merupakan masa yang krusial karena akan menjadi tonggak yang menentukan keberlanjutan proses ASEAN dalam mencapai Visi Masyarakat ASEAN 2025. Melalui pengesahan dokumen *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang salah satunya berisi *ASEAN Community Vision 2025* pada tahun 2015 lalu, ASEAN berupaya untuk menjadi suatu Masyarakat yang *"politically cohesive, economically integrated,* dan *socially responsible*". Dalam kaitan tersebut pula, Laos selaku Ketua ASEAN tahun 2016 mencanangkan visi "*Turning Vision Into Reality*".

Rangkaian KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN serta KTT Terkait lainnya yang diselenggarakan di Vientiane, Laos, 6-8 September 2016, merupakan rangkaian KTT pertama sejak Masyarakat ASEAN resmi terbentuk. ASEAN selalu mendapat dukungan dari Mitra Wicaranya dalam berbagai kerja sama yang telah disepakati bersama. Berbagai dukungan tersebut kembali ditegaskan pada rangkaian KTT Terkait Lainnya tahun 2016 ini yang terdiri dari 9 pertemuan.

KTT ke-19 ASEAN-Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

KTT ke-19 ASEAN-RRT menjadi istimewa karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun kerja sama kemitraan ASEAN-RRT. Berbagai kerja sama yang saling menguntungkan telah dicapai dalam 25 tahun kemitraan ASEAN-RRT, antara lain di bidang perdagangan dan investasi, konektivitas, infrastruktur, dan penguatan *people-to-people connections*.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan RRT diharapkan untuk mendukung pencapaian *twin-goals* target perdagangan sebesar US$ 1 triliun dan investasi sebesar US$150 miliar hingga tahun 2020, mengintensifkan negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, dan pelaksanaan *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025*. Lebih lanjut, tahun 2017 disepakati sebagai *ASEAN- China Year of Tourism Co-operation* untuk meningkatkan arus wisatawan di kawasan ASEAN dan RRT dalam mendukung kerja sama ekonomi maupun *people-to-people connections*. Selain itu, telah disahkan juga *Joint Statement between ASEAN and China on Production Capacity Cooperation* sebagai salah satu *outcome documents* dari KTT tersebut.

SETKAB.GO.ID

Pada isu Laut China Selatan (LCS), Pertemuan menyepakati pentingnya mendorong implementasi penuh dan efektif DOC dan penyelesaian sesegera mungkin COC. Dalam kaitan ini, Pertemuan telah mengesahkan dua dokumen penting yaitu *Joint Statement on the Application of the Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) in the South China Sea* dan Panduan Komunikasi *Hotline*.

KTT ke-19 ASEAN-Jepang

Pada pertemuan ini, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Jepang membahas antara lain mengenai arti penting Jepang sebagai mitra perdagangan dan investasi ASEAN, yaitu penyediaan dana bantuan sebesar 200 miliar dolar AS dari Jepang untuk pembangunan infrastruktur di Asia termasuk ASEAN, peningkatan kerja sama *people-to-people contact* dan peningkatan sumber daya manusia, serta pemberantasan terorisme dan ekstremisme.

Tidak hanya itu, Pertemuan juga menekankan arti penting menjaga kemananan dan stabilitas kawasan LTS, terutama jaminan atas *freedom of navigation and overflight*. Selain LCS, Pertemuan juga mendukung proses denuklirisasi Semenanjung Korea secara damai dan penyelesaian atas kasus penculikan Warga Negara Jepang oleh Agen Korea Utara/RDRK.

KTT ke-18 ASEAN-Republik Korea (ROK)

Beberapa fokus utama yang mengemuka dalam pembahasan KTT ini antara lain adalah peningkatan kerja sama untuk mencapai target perdagangan dua arah sebesar US$200 miliar pada tahun 2016, serta penanggulangan terorisme dan ekstremisme. Tak kalah pentingnya, berbagai bidang kerja sama pun dibahas yaitu mengenai pemberdayaan UMKM, pertukaran masyarakat dan pemuda, serta kerja sama sosial budaya.

KTT ke-19 *ASEAN Plus Three (APT)*

KTT ini merupakan pertemuan para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dengan RRT, Jepang dan ROK untuk membahas antara lain peningkatan kerja sama politik dan keamanan, keuangan, ketahanan pangan, penanganan kejahatan lintas batas, pariwisata, wacana pembentukan masyarakat Asia Timur, penguatan *track 1.5* dan *track 2* dalam APT, serta isu strategis lainnya di kawasan.

Dalam pertemuan ini, Indonesia menyampaikan bahwa RRT, Jepang dan ROK adalah kunci dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Di tengah situasi kawasan yang diwarnai dengan ketidakpercayaan dan ketegangan, ketiga negara tersebut harus mendukung mekanisme APT sehingga mampu menjadi *guardian of peace and stability in the region*. Untuk mengatasi tantangan ini, APT perlu memperkokoh kepercayaan, menahan diri, menghormati hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mengedepankan kerja sama dalam pembangunan dan kesejahteraan kawasan.

Untuk mendorong keseimbangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, Indonesia menegaskan pentingnya penguatan *safety net* di sektor strategis, terutama pada saat krisis, antara lain melalui *Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM)* dan *Asian Bond Market Initiative* di bidang keuangan serta *APT Emergency Rice Reserves (APTERR)* di bidang ketahanan pangan.

KTT Dua Tahunan Pertama ASEAN-Australia

Tahun 2016, ASEAN dan Australia untuk pertama kalinya mengadakan pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan secara reguler. Bidang-bidang kerja sama yang menjadi fokus pembahasan pertemuan tersebut antara lain adalah peningkatan kerja sama penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara, peningkatan perdagangan dan investasi, serta kerja sama pendidikan melalui pemanfaatan program *New Colombo Plan*. Untuk arah ke depan kerja sama kemitraan ASEAN-Australia, pertemuan menggarisbawahi beberapa bidang kerja sama, antara lain sains dan teknologi, energi, ketahanan pangan, pertanian yang berkelanjutan, penanggulangan bencana, dan layanan kesehatan. Rencananya, KTT ASEAN dan Australia akan terus diselenggarakan setiap dua tahun sekali.

CCTV.AMERICA.COM

Pada kesempatan ini, telah disahkan *Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* yang merupakan pembaruan dari dokumen yang sama yang disahkan pada tahun 2004.

KTT ke-8 ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pembahasan pada KTT ke-8 ASEAN PBB yang paling mengemuka adalah penyelarasan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dipastikan dapat merealisasikan berbagai program strategis pada dua mega agenda tersebut. Upaya penyelarasan ini untuk memberikan kontribusi positif bagi perdamaian, stabilitas keamanan dan kemakmuran masyarakat di kawasan dan dunia.

ASEAN dan PBB berkomitmen untuk bekerja sama secara komprehensif dan menyeluruh dalam menghadapi berbagai tantangan lintas batas di kawasan dan dunia, seperti terorisme dan ekstremisme, kejahatan maritim, narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia, serta bencana alam dan perubahan iklim.

Dalam KTT tersebut, Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap penguatan Masyarakat ASEAN dan memastikan tercapainya Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 melalui dua area kerja sama, yaitu pengentasan kemiskinan serta penanganan wabah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Selain itu, Indonesia mendukung penyelesaian isu Palestina penting untuk terus ditindaklanjuti sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap perdamaian dunia.

KTT ke-14 ASEAN-India

Salah satu KTT yang juga telah diselenggarakan di Laos, September 2016 adalah KTT ke-14 ASEAN-India. Pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India tersebut telah membahas mengenai pemeliharaan keamanan dan stabilitas laut yang menghubungkan ASEAN-India, kerja sama konektivitas antara ASEAN-India, peningkatan kerja sama di bidang anti terorisme dan ekstremisme, termasuk perekrutan melalui media

THEDIPLOMAT.COM

sosial dan internet, serta menurunnya nilai perdagangan ASEAN-India pasca *ASEAN-India Free Trade Agreement*.

Indonesia menekankan pentingnya kerja sama maritim, terutama untuk mendukung keketuaan Indonesia di *Indian Ocean Rim Association (IORA)* periode 2015-2017 dan implementasi *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*. Selain kedua hal di atas, tujuan mengedepankan kerja sama maritim adalah untuk mendorong peningkatan kerja sama konektivitas darat, laut dan udara yang akan meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata dan *people-to-people contact*, serta menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas dalam kerja sama ASEAN-India.

KTT ke-4 ASEAN-Amerika Serikat

KTT ini membahas antara lain realisasi *ASEAN-U.S. Connect Initiative* yang diwujudkan dengan rencana pendirian *ASEAN-U.S. Connect Centre* di Jakarta, Bangkok, dan Singapura; penanganan isu keamanan tradisional dan non-tradisional; kesehatan global; perubahan iklim; *IUU Fishing*; pemberdayaan UMKM; *excess capacity in steel*; serta pembangunan kapasitas pemuda dan pemudi.

Pertemuan ini sekaligus menjadi Pertemuan terakhir bagi Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dengan Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN seiring dengan akan segera berakhirnya masa jabatan Obama sebagai Presiden Amerika Serikat.

KTT ke-11 Asia Timur (*11th East Asia Summit*)

Pertemuan para Kepala Negara/Pemerintahan negara peserta *East Asia Summit (EAS)* kembali menegaskan arti penting kerja sama maritim di antara negara peserta EAS untuk menjamin perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran kawasan. Selain itu, pertemuan juga mendorong peningkatan kerja sama pencegahan dan pemberantasan terorisme, termasuk penghancuran sumber dana aktivitas terorisme, pencegahan *self-radicalization* melalui media sosial dan internet.

Pertemuan ini mengesahkan beberapa dokumen yaitu *EAS Statement on Strengthening Responses on Migrants in Crisis and Trafficking in Persons* untuk meningkatkan kerja sama penangulangan *irregular migrants* dan *trafficking in persons; Vientiane Declaration on Promoting Infrastructure Development* untuk meningkatkan konektivitas di kawasan melalui pembangunan infrastruktur dengan menggunakan sumber pendanaan yang ada di kawasan; serta *EAS Statement on Non Proliferation* sebagai bentuk respon terhadap isu Semenanjung Korea.●

ARIF SETYANTO/
DIT. MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

KERJA SAMA *EAST ASIA SUMMIT*

UPAYA MENJAMIN PERDAMAIAN, STABILITAS, KEAMANAN, DAN KEMAKMURAN KAWASAN

ASEAN.ORG

KTT ke-11 Asia Timur (*East Asia Summit/EAS*) telah diselenggarakan di Vientiane, Laos, tanggal 8 September 2016 yang lalu dalam rangkaian KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya. KTT ini dihadiri oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan 18 negara peserta EAS. Berlangsungnya KTT ini merupakan komitmen para pemimpin EAS untuk menjamin perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran kawasan, melalui penguatan kerja sama di bidang maritim, pencegahan dan pemberantasan terorisme, konektivitas, ekonomi dan keuangan, serta kesehatan global dan penyakit menular.

Kerja sama maritim menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam kerangka kerja sama EAS. Perlu diingat bahwa, pada KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 22 November 2015 silam, prakarsa Indonesia "*EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*" berhasil disahkan. *EAS Statement* tersebut memiliki lima pilar yaitu pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan; pemajuan perdamaian, stabilitas, dan keamanan; upaya mengatasi berbagai tantangan lintas batas; konektivitas maritim; serta kerja sama antar lembaga penelitian. Hal ini sejalan dengan komitmen para pemimpin EAS untuk terus menjamin perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.

Hampir setahun *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* berhasil disahkan. Kini para pemimpin berkomitmen untuk menindaklanjuti dokumen tersebut menjadi sebuah implementasi yang konkret. Australia telah mengajak Indonesia untuk menjadi *co-host* dalam seminar terkait kerja sama keamanan maritim yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2016 mendatang di Sydney, Australia. Di samping itu, Indonesia juga terus mendorong negara peserta EAS lainnya untuk mengimplementasikan *EAS Statement* dimaksud secara nyata.

Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas Kawasan

Akhir-akhir ini, situasi di kawasan mengalami gejolak yang diakibatkan oleh kurangnya rasa saling percaya (*trust deficit*) di antara negara-negara di kawasan. Kerja sama EAS diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut melalui pembahasan arsitektur keamanan kawasan yang terus bergulir. Setelah Indonesia mempresentasikan *synthesis paper* mengenai arsitektur keamanan kawasan pada *5th EAS Workshop on Regional Security Architecture* di Beijing, RRT, pada 27-28 Juni 2016 silam, pembahasan mengenai arsitektur keamanan kawasan masih akan terus berlanjut untuk mencari jawaban terhadap *trust deficit* yang terjadi di kawasan.

Terkait situasi di Laut China Selatan (LCS), para pemimpin menggaris-

LATROBE.EDU.AU

Presiden AS Barrack Obama bersama pemimpin negara Asia Timur saat menghadiri KTT ke-11 Asia Timur di Vientiane Laos, 8 September 2016.

bawahi pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan di LCS dengan mengimplementasikan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* secara penuh dan efektif serta penyelesaian *Code of Conduct in the South China Sea (COC) Framework* pada tahun 2017. Para kepala negara/pemerintahan negara peserta EAS menyampaikan penghargaan atas *Joint Code of Conduct for Unplanned Encounter at Sea (CUES)* dan *hotline* antar Kementerian Luar Negeri ASEAN dan RRT sebagai hasil dari KTT Peringatan 25 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-RRT. KTT Peringatan 25 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-RRT masih merupakan satu rangkaian dalam KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya.

Pada KTT ke-11 EAS, para pemimpin mengesahkan prakarsa Australia atas *EAS Statement on Non Proliferation. Statement* ini menegaskan pentingnya perdamaian di Semenanjung Korea, terutama upaya denuklirisasi, serta mencerminkan komitmen penuh para pemimpin dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan.

Outcome document lainnya yang berhasil disahkan adalah *EAS Statement on Strengthening Responses on Migrants in Crisis and Trafficking in Persons* yang merupakan prakarsa Amerika Serikat. Dokumen dimaksud bertujuan mendorong kerja sama di antara negara peserta EAS dalam menangani para migran dan juga isu *Trafficking in Persons*. Salah satu kerja sama yang dibangun melalui dokumen ini adalah bagaimana negara di kawasan bersama-sama mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di negara asal yang menyebabkan terjadinya perpindahan para migran secara ireguler (*irregular movement of migrants*).

Menuju Kemakmuran Kawasan

Kondisi kawasan yang damai, aman, dan stabil dipercaya dapat membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat di kawasan. Beriringan dengan upaya menciptakan kemakmuran di kawasan, kerja sama di bidang ekonomi terus ditingkatkan melalui kerangka kerja sama EAS. Para pemimpin mendorong percepatan proses negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Negara peserta EAS yang menjadi pihak pada *Trans-Pacific Partnership (TPP)* mengharapkan agar RCEP dan TPP dapat saling melengkapi.

Selain itu, konektivitas di kawasan juga merupakan kerja sama penting untuk memajukan kemakmuran kawasan. Para kepala negara/pemerintahan EAS mengesahkan *Vientiane Declaration on Promoting Infrastructure Development* sebagai prakarsa Laos untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur dengan menggunakan sumber pendanaan yang ada di kawasan.

KTT ke-11 EAS kali ini telah menunjukan komitmen dari para pemimpin untuk terus membangun Asia Timur menuju sebuah kawasan yang damai, stabil, aman, dan makmur. Diharapkan agar komitmen-komitmen tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat di kawasan. Karena itu, ke depan Indonesia perlu mendorong kerja sama EAS untuk mengimplementasikan dokumen-dokumen yang telah disahkan pada KTT ke-11 EAS ini secara konkret.●

AMELIA LIMANJAYA/
DIT. MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

MASA DEPAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ASEAN

Dengan berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, proses integrasi ekonomi kawasan menjadi suatu keniscayaan. Secara tidak langsung, hal tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik ASEAN sebagai suatu pasar tunggal yang berdaya saing tinggi telah terimplementasikan. Adapun empat karakteristik MEA adalah (i) pasar tunggal dan basis produksi, (ii) kawasan berdaya saing tinggi, (iii) pertumbuhan ekonomi merata, dan (iv) kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global.

Capaian *scorecard* Cetak Biru MEA 2015 sebesar 92,7% menunjukkan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang dipandang stabil dengan rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 5,3% (2011-2014). Dengan kata lain, kondisi perekonomian ASEAN dinilai membaik sejalan dengan implementasi Cetak Biru MEA 2015.

Salah satu faktor yang menunjang terwujudnya kondisi tersebut adalah adanya konektivitas di kawasan yang tercermin melalui pembentukan *Hanoi Declaration on the Adoption of the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)* tahun 2011.

Secara prinsip, deklarasi tersebut bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pembangunan, mendorong proses integrasi, meningkatkan daya saing, serta mendorong keterhubungan antar masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, ASEAN sepakat membentuk tiga pilar konektivitas, yaitu konektivitas fisik, konektivitas institusional, dan konektivitas *people-to-people*.

Konektivitas Fisik

Konektivitas fisik berpusat pada pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem transportasi intermoda yang terintegrasi, serta memperluas jaringan *information communication technology* (ICT) dan energi.

Konektivitas Institusional

Guna mewujudkan strategi dan mekanisme kebijakan secara efektif, konektivitas institusional perlu didorong dalam hal fasilitasi perdagangan barang dan jasa, serta aliran investasi sehingga proses mobilisasi barang dan jasa dapat berlangsung baik dan adanya daya tarik bagi investor untuk berinvestasi.

Konektivitas *people-to-people*

Konektivitas yang berpusat pada masyarakat ini bertujuan mengembangkan kualitas SDM melalui pendidikan, inovasi, dan kewirausahaan, serta mendorong pertukaran budaya dan mengembangkan industri pari-

wisata.

MPAC memuat 19 *key strategies*, 84 *key actions*, dan 15 *priority projects*. Dari 15 proyek prioritas dalam MPAC, beberapa terkait dengan diplomasi maritim Indonesia yaitu Studi sistem RoRo (*roll-on-roll-off*) yang sangat bermanfaat bagi wilayah kepulauan di ASEAN dan Indonesia. Rekomendasi hasil studi menyebutkan tiga rute prioritas:

a. Dumai—Malaka
b. Belawan—Penang—Phuket *Triangle Route*
c. Davao/General Santos—Bitung

Lalu, apakah dengan adanya MPAC yang dicanangkan tahun 2011, proses integrasi di ASEAN semakin progresif? Pertama, aktivitas perdagangan di ASEAN dipandang semakin produktif. Pada tahun 2011, neraca perdagangan ASEAN mengalami defisit sebesar -9,010 juta dolar AS, sementara defisit tersebut mengalami penurunan menjadi -7,777 juta dolar AS pada tahun 2015.

Aktivitas perdagangan yang semakin berkembang salah satunya juga ditunjang dengan adanya sistem transportasi yang memadai dan perizinan yang semakin sederhana sehingga dampak dari fasilitasi perdagangan semakin terasa. Dengan kata lain, tujuan integrasi ASEAN sebagai basis produksi semakin efektif dengan berkembangnya ekspor yang dilakukan dibandingkan dengan impor.

Kedua, negara-negara ASEAN secara keseluruhan juga dipandang semakin berdaya saing. Berdasarkan data indeks daya saing dari *World Economic Forum (WEF)*, ASEAN secara kolektif berada di peringkat 41 daya saing tertinggi dunia tahun 2011, sementara pada tahun 2013, ASEAN mengalami kenaikan 3 peringkat menjadi 38. Indeks daya saing tersebut didasarkan pada kondisi infrastruktur, perkembangan pasar finansial, dan inovasi.

Singkatnya, implementasi MPAC dipandang cukup efektif dalam menunjang proses integrasi kawasan ASEAN sejak *master plan* tersebut dibentuk tahun 2011.

Meskipun demikian, implementasi MPAC belum sepenuhnya optimal. Hasil *assessment* implementasi MPAC tahun 2016 menunjukkan 37 dari 125 inisiatif yang diusulkan telah berhasil diterapkan atau sekitar 37% tingkat implementasinya. Sementara itu, inisiatif lainnya masih dalam tahap implementasi atau belum dilakukan sama sekali.

Beberapa kendala yang teridentifikasi menjadi penyebab belum terlaksananya inisiatif tersebut, antara lain (a) perbedaan tingkat komitmen setiap negara, (b) perbedaan perencanaan nasional, (c) kurangnya koordinasi antar badan sektoral, dan (d) tidak adanya *timeframe* yang realistis.

TEROPONGBISNIS.COM

Guna memberikan manfaat yang lebih efektif dari implementasi MPAC serta memberi gambaran ke depan mengenai peningkatan konektivitas, ASEAN sepakat untuk membentuk MPAC 2025 yang telah diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan 29 bulan September 2016 melalui *Vientiane Declaration on the Adoption of the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025*.

Pada prinsipnya, MPAC 2025 disusun untuk melanjutkan visi MPAC sebelumnya dalam membangun Masyarakat ASEAN yang efektif, serta menjamin harmonisasi dari implementasi tiga pilar Masyarakat ASEAN; (i) pilar Politik-Keamanan ASEAN, (ii) pilar ekonomi ASEAN, dan (iii) pilar Sosial-Budaya ASEAN. Adapun visi MPAC 2025 adalah mewujudkan ASEAN yang terintegrasi secara menyeluruh guna menunjang daya saing, inklusivitas, dan semangat sebagai suatu komunitas.

Untuk itu, MPAC 2025 berfokus pada 5 (lima) area strategis, yaitu (i) infrastruktur berkelanjutan, (ii) inovasi digital, (iii) *seamless logistic*, (iv) peraturan yang mumpuni, dan (v) mobilitas manusia. Perbedaan mengemuka antara MPAC 2025 dengan versi sebelumnya adalah adanya pemanfaatan inovasi digital dan *seamless logistic*. Dengan kata lain, MPAC 2025 memberikan manfaat dalam hal pengembangan kapasitas teknologi sehingga negara-negara ASEAN dapat memanfaatkan akses pasar secara lebih optimal.

Contohnya, terkait pengembangan inovasi digital, MPAC memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM, khususnya untuk memperoleh akses finansial melalui teknologi. Ini sejalan dengan semakin maraknya fenomena *start-up* yang berkembang di ASEAN, seperti sejumlah situs belanja *online* dan layanan berbasis digital.

Bagi Indonesia, inovasi digital juga merupakan sesuatu yang tidak terelakan. Hal tersebut sejalan dengan semangat nasional untuk mendorong industri kreatif dalam pemanfaatan teknologi melalui program perwujudan 1.000 *technopreneur* tahun 2020. Program ini sekaligus bertujuan untuk mendorong daya saing UMKM Indonesia di ASEAN.

Singkatnya, MPAC merupakan suatu program berkelanjutan dalam membangun konektivitas ASEAN sehingga MPAC 2025 merupakan tindak lanjut dari implementasi MPAC sebelumnya. Meskipun belum sepenuhnya terlaksana saat implementasi MEA 2015, langkah aksi dalam membangun konektivitas masih diteruskan dan bahkan semakin berkembang.●

I MADE DIANGGA AK/
DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

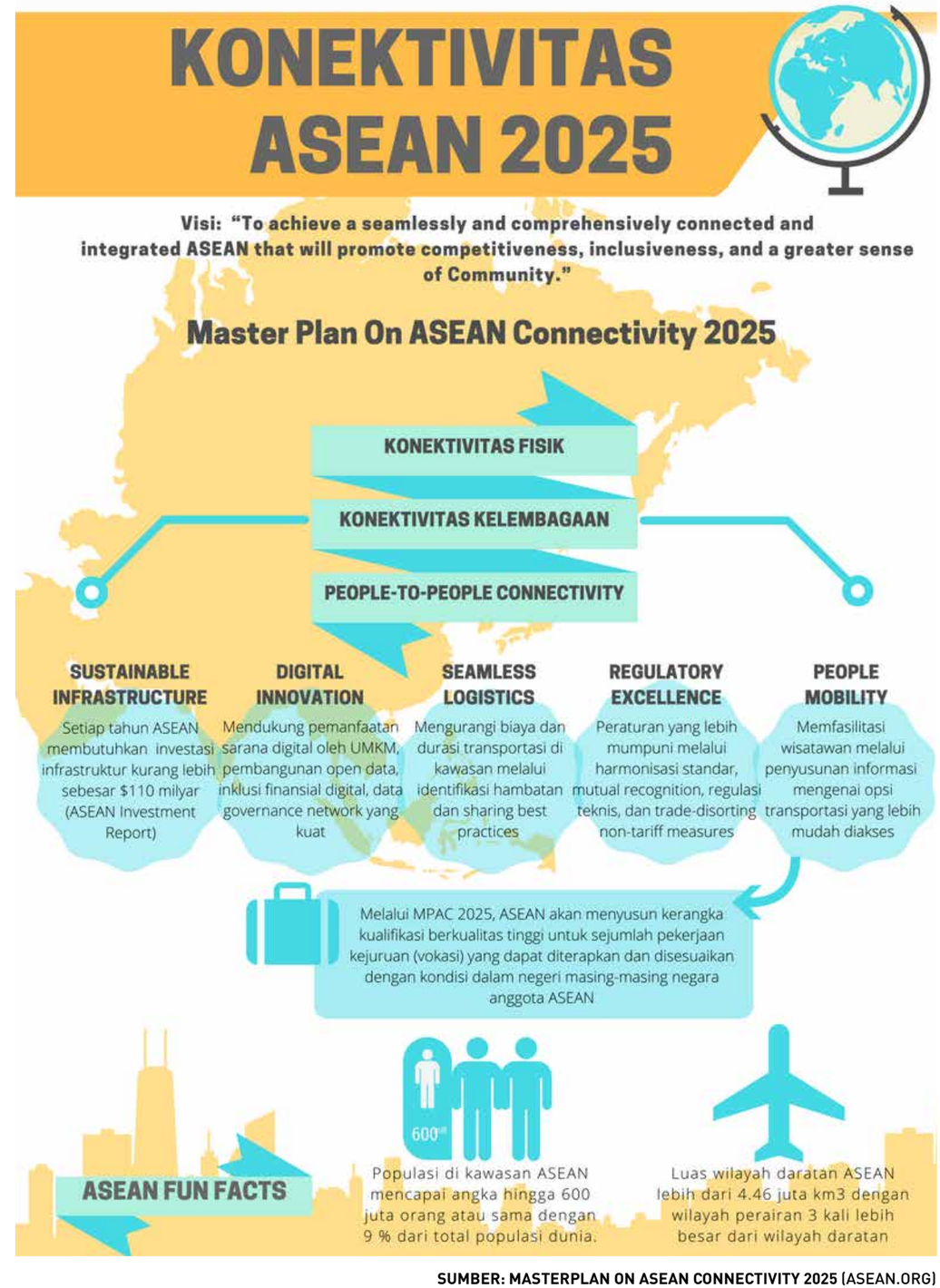

SUMBER: MASTERPLAN ON ASEAN CONNECTIVITY 2025 (ASEAN.ORG)

INDONESIA DALAM KONEKTIVITAS ASEAN

Dari aspek perekonomian, konektivitas merupakan *backbone* untuk kelancaran kegiatan komersial. Konektivitas berperan dalam menjamin kelancaran kegiatan ekonomi, terutama distribusi produk yang akhirnya akan sampai di tangan konsumen untuk dikonsumsi dan menjadi sebuah roda perputaran ekonomi yang terus berputar. Pentingnya konektivitas bagi ASEAN telah disadari oleh *AMS Leaders* sejak tahun 2010 dengan diadopsinya *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)* melalui *Hanoi Declaration on the Adoption of the Master Plan on ASEAN Connectivity*. MPAC 2010 menjadi dokumen persetujuan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan konektivitas ASEAN yang mencakup 19 *key strategies, 84 key actions,* dan *15 priority projects* di tiga aspek, yaitu konektivitas fisik, konektivitas institusional, dan *people to people connectivity*. Ketiga aspek konektivitas tersebut disusun untuk mendukung pembentukan Masyarakat ASEAN 2015.

Hingga Mei 2016, MPAC 2010 memiliki tingkat implementasi sebesar 37%. Perbedaan tingkat komitmen setiap negara, perbedaan dengan perencanaan nasional, kurangnya koordinasi antar *sectoral bodies* terkait, dan tidak adanya *timeframe* pelaksanaan yang realistis, dinilai menjadi penyebab rendahnya tingkat implementasi MPAC 2010.

Dengan berakhirnya 2015, ASEAN kemudian menyiapkan dokumen lanjutan yaitu *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025* yang disusun untuk mendukung pencapaian Masyarakat ASEAN 2025. Pada KTT ke-28 ASEAN, MPAC 2025 secara resmi diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN. MPAC 2025 memiliki 5 *strategic area* yaitu *Sustainable Infrastructure, Digital Innovation, Seamless Logistics, Regulatory Excellence*, dan *People Mobility*. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa MPAC 2025 masih memiliki elemen konektivitas fisik, institusional, dan *people to people*. *Sustainable Infrastructure* berkaitan erat dengan konektivitas fisik, *Digital Innovation, Seamless Logistics*, dan *Regulatory Excellence,* berkaitan dengan konektivitas institusional, dan *People Mobility* berkaitan dengan *people to people connectivity*. Di atas kertas memang secara mudah dapat dikategorisasikan, namun dalam proses implementasi dibutuhkan koordinasi yang erat antar *sectoral bodies* terkait.

Tulisan ini selanjutnya akan difokuskan kepada konektivitas fisik, khususnya pembangunan *sustainable infrastructure*. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sangat berhubungan dengan jasa konstruksi. Peluang pasar jasa konstruksi Indonesia merupakan yang terbesar di ASEAN dengan angka mencapai USD 267 milyar. Tidak hanya itu, Jakarta merupakan pasar konstruksi yang paling berkembang pesat di Asia menurut *Asia Construction Outlook, AECOM 2014*.

> **Jakarta merupakan pasar konstruksi yang paling berkembang pesat di Asia, menurut *Asia Construction Outlook*, AECOM 2014.**

Lantas, bagaimana peluang pelaku jasa konstruksi Indonesia untuk memanfaatkan skema pembangunan konektivitas fisik di ASEAN?

Di dalam MPAC telah diidentifikasi beberapa proyek utama seperti *ASEAN Highway Network (AHN), Singapore-Kunming Rail Link (SKRL), Maritime Transport and Inland Waterways*, 10.000 km pipa minyak dan gas, serta *ICT Infrastructure and The ASEAN Broadband Corridor*. Untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek tersebut, pelaku jasa konstruksi dapat memanfaatkan skema *Movement of Natural Persons (MNP)* dan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, pelaku jasa konstruksi Indonesia didorong untuk membekali dirinya dengan sertifikasi *ASEAN Architects* dan *ASEAN Charterd Professional Engineer*. Kedua skema tersebut dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja profesional untuk memaksimalkan potensi pasar jasa konstruksi ASEAN.

Walaupun pelaku jasa konstruksi belum memiliki keinginan untuk melakukan ekspansi ke negara ASEAN lainnya, pelaku jasa konstruksi tetap perlu melakukan sertifikasi karena pelaku jasa konstruksi asing perlu bekerja sama dengan pelaku jasa konstruksi lokal yang memiliki sertifikasi untuk masuk ke Indonesia. Jika tidak terdapat pelaku jasa konstruksi lokal yang memiliki sertifikasi, pelaku jasa konstruksi asing dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, sertifikasi dapat dipahami pula sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pelaku jasa konstruksi lokal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jimmy Juwana selaku Ketua Komite Luar Negeri Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sebagai narasumber pada acara Penyampaian Saran Kebijakan "Mendorong Peningkatan Kompetensi Jasa Konstruksi Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN" di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2016.

Saat ini sudah terdapat 844 insinyur dan 111 arsitek yang telah diakui oleh ASEAN. Diharapkan tenaga profesional tersebut dapat memanfaatkan skema yang telah disediakan oleh ASEAN untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang telah diidentifikasi dalam MPAC. Partisipasi langsung masyarakat diharapkan dapat menjadi jalan untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada masyarakat ASEAN. ●

IKA ANNISAA FARISTA
DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

DJOKO MURJATMODJO
DIREKTUR OPERASIONAL DAN TEKNIK PT. ANGKASA PURA II /PLT. DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA II

KONEKTIVITAS ASEAN AKAN MEMBUAT INDONESIA BERJAYA DI UDARA

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Tim Redaksi Majalah Masyarakat ASEAN (MMA) menyambangi kantor pusat Angkasa Pura II di Gedung 600 Bandara Soekarno-Hatta untuk berbincang secara langsung dengan Direktur Operasional dan Teknik Angkasa Pura II, selaku Plt. Direktur Utama Angkasa Pura II (AP II), Djoko Murjatmodjo. Pada kesempatan kali ini, Tim Redaksi MMA ingin menggali informasi mengenai konektivitas ASEAN dari perspektif sektor transportasi udara, terutama kaitannya dengan pelayanan bandara. Berikut hasil wawancara Tim MMA dengan beliau.

Apakah AP II telah menjalin kerja sama dengan negara anggota ASEAN atau negara mitra wicara ASEAN untuk meningkatkan pelayanan transportasi udara Indonesia?

Kerja sama dengan sesama anggota ASEAN telah dilakukan melalui *Open Sky Agreement*, yaitu kebijakan untuk membuka wilayah udara antar sesama anggota negara ASEAN. Ada dua bandara wilayah kerja AP II yang termasuk dalam area kerja sama *Open Sky Agreement*, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta dan Kualanamu di Medan. Jadi otomatis penerbangan dari negara-negara anggota ASEAN ke kedua kota tersebut sudah tidak ada batasan lagi. Meskipun masih ada beberapa peraturan perizinan, namun dengan adanya kebijakan ini tentu saja terdapat peningkatan konektivitas antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya.

Secara langsung, AP II tidak bekerja sama dengan negara anggota ASEAN atau negara mitra wicara ASEAN. Namun demikian, saat ini AP II tengah menjalin kerja sama dengan perusahaan yang berbasis di negara mitra wicara ASEAN yaitu *Incheon International Airport Corporation di Korea Selatan*. AP II juga akan memanfaatkan layanan *automatic guideway transit (AGT)* dari Korea Selatan dan asistensi dari pihak Incheon terhadap operasionalisasi *tenant mixing* di Terminal 3 untuk meningkatkan fasilitas layanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kerja sama dengan negara mitra wicara ASEAN juga dilakukan, misalnya dengan ikut berpartisipasi pada *joint conference* di Kansai, Je-

pang. Selain itu, AP II juga menjalin kerja sama dengan *Vanderlande* di Belanda. Vanderlande merupakan *vendor* dari *automated baggage handling system* yang diberlakukan di Terminal 3 bandara Soekarno-Hatta.

Kerja sama juga dilakukan pada tataran sub-regional melalui *BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area)* atau *IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)*. Kedua kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara anggotanya. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam kerja sama BIMP-EAGA misalnya saja Pontianak dan untuk IMT-GT adalah Riau.

Menurut Bapak, manfaat apa yang dapat dipetik dari meningkatnya integrasi ASEAN melalui konektivitas antar negara anggota ASEAN?

Adanya peningkatan konektivitas merupakan suatu hal yang positif di mana akan terdapat banyak peluang atau potensi kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Di samping itu, integrasi ASEAN juga akan membuat kami masuk ke dalam suatu kompetisi dengan bandara-bandara lain di ASEAN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada maskapai dan penumpang pesawat, sehingga kami dapat ikut mendorong peningkatan industri pariwisata maupun industri lainnya. Perlu diperhatikan bahwa, kerja sama yang diupayakan di tataran regional ini dapat mendorong terwujudnya efektifitas dan efisiensi pada pelayanan transportasi udara. Karena, kedua hal tersebut merupakan kunci utama. Selain itu, hendaknya kerja sama dalam hal konektivitas ini dilandasi dengan prinsip resiprositas, misalnya saja melalui saling tukar menukar informasi atau *sharing best practices*.

Salah satu kunci untuk menyukseskan Masyarakat ASEAN adalah melalui penguatan konektivitas ASEAN. Kontribusi apa yang dapat diberikan oleh Indonesia untuk mewujudkan hal ini, terutama dari sektor transportasi udara?

Peranan Indonesia di sektor transportasi udara saat ini dapat dilihat dari ditetapkannya lima bandara di Indonesia yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk kebijakan *Open Sky ASEAN*. Lima bandara tersebut yaitu; Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara I Gusti Ngurah Rai (Denpasar), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Sultan Hasanuddin (Makasar), Bandara Kualanamu (Medan).

Namun demikian, apabila kita bicara peranan Indonesia secara menyeluruh dari aspek konektivitas ini akan sangat dominan, karena sebagian besar wilayah di kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah Indonesia. Selain dari segi luas wilayah, Indonesia juga diuntungkan dalam hal banyaknya jumlah bandara. Karena itu, upaya untuk meningkatkan peranan Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penguatan konektivitas ASEAN harus terus dilakukan.

Pembukaan penerbangan sangat penting karena satu hal utama untuk memajukan layanan transportasi udara adalah melalui peningkatan arus lalu lintas udara *(traffic)*. Kerja sama tidak hanya dilakukan antarbandara di negara anggota ASEAN saja karena sejatinya bandara berfungsi sebagai titik-titik simpul. Peningkatan konektivitas akan dapat sepenuhnya terwujud apabila kerja sama yang lebih baik juga dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak seperti maskapai (*airlines)* dan navigasi.

SKYSCRAPERCITY.COM

Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten, salah satu bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II.

INDRATRAVELHOLIC.COM

Bandara Kualanamu Medan, salah satu bandara kelolaan PT Angkasa Pura II yang menjalankan *Open Sky ASEAN.*

Pemerintah bersama dengan Angkasa Pura saat ini mencanangkan sejumlah proyek untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur transportasi udara, kira-kira daerah mana saja yang menjadi prioritas? Alasannya?

Berdasarkan wilayah kerja AP II, maka fokus peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur transportasi udara ada di Indonesia bagian barat. Saat ini kami mengelola 13 bandara di Indonesia bagian barat, di mana kami fokus pada peningkatan pelayanan di seluruh bandara tersebut. Alasan utama peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur transportasi udara yaitu untuk memicu peningkatan *traffic*, karena volume lalu lintas udara berkaitan pula dengan kenyamanan masyarakat untuk menggunakan transportasi udara.

AP II juga telah melakukan pengembangan bandara dan pembangunan terminal baru di sejumlah bandara, antara lain yang baru-baru ini diresmikan yakni: Bandara Kualanamu (Medan); Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang); dan Sultan Thaha Syaifuddin (Jambi). Adapun beberapa bandara yang sedang dalam tahap pembangunan seperti: Bandara Supadio (Kubu Raya); Bandara Depati Amir (Pangkal Pinang); Bandara Husein Sastranegara (Bandung); dan Bandara Silangit (Siborong-Borong).

Beberapa bandara terus ditingkatkan kualitasnya dengan mempertimbangkan potensi wisata yang ada di daerahnya, misalnya Bandung, Silangit, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang. Bahkan rencananya akhir tahun ini akan ada penerbangan langsung dari Tanjung Pinang ke Tiongkok. Sementara itu, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga baru saja dioperasikan pada 9 Agustus 2016 lalu.

AP II memiliki tugas pokok untuk mengelola dan mengembangkan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara untuk wilayah Indonesia bagian barat. Kendala apa yang dialami oleh Angkasa Pura dalam melaksanakan tupoksi tersebut? Bagaimana AP II mengatasinya?

Kendala yang kami hadapi sebenarnya tidak terlalu besar. Secara umum kendala yang dialami selama ini lebih bersifat kasuistis dan berbeda di setiap wilayah kerja. Hal terpenting dalam mengatasi kendala tersebut adalah mengedepankan koordinasi dengan seluruh pihak berkepentingan untuk menyamakan visi dan misi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa nama Indonesia harum di dunia internasional.

Perlu diketahui bahwa salah satu tugas kami adalah meningkatkan *traffic*, bagaimana volume lalu lintas udara kita bisa terus dipicu. Namun upaya untuk meningkatkan *traffic* ini membutuhkan peranan berbagai pihak, misalnya saja terkait dengan kesepakatan bilateral yang dimiliki antar negara, kapasitas dan kemauan maskapai untuk membuka penerbangan langsung ke luar negeri, dan sebagainya. Salah satu hal yang sudah kita lakukan yaitu dengan memberikan insentif agar maskapai-maskapai dari luar negeri mau masuk ke Indonesia. Selain itu, kita terus melakukan kerja sama dalam hal pemasaran, baik dengan maskapai penerbangan maupun Pemerintah Daerah untuk menciptakan obyek-obyek wisata baru yang dapat kita tawarkan ke negara lain, termasuk negara-negara di ASEAN.

Apakah Bapak optimis Indonesia akan menjadi motor bagi pengembangan industri transportasi udara di kawasan Asia Tenggara?

Kami cukup optimistis, terutama mempertimbangkan aspek wilayah Indonesia yang sangat luas seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Besarnya peranan dalam hal konektivitas adalah mengenai siapa yang paling banyak terikat dalam jaringan konektivitas tadi. Oleh karena itu, kita harus sesegera mungkin saling bekerja sama agar Indonesia menjadi pemain penting dalam konektivitas ASEAN. Pihak bandara perlu saling berbenah, lalu kami juga meminta agar pihak maskapai penerbangan nasional untuk meningkatkan jumlah penerbangan langsung ke negara anggota ASEAN.

Dari segi pelayanan bandara sendiri kami sudah cukup mantap karena pertumbuhan maskapai dan sektor pendukung lainnya seperti MRO (*maintenance, repair, overhaul)* atau bengkel pesawat cukup bagus berkat dukungan kebijakan dari pemerintah. Melalui Terminal 3, kami saat ini juga mengupayakan Bandara Soekarno-Hatta dapat menjadi bandara transit. ●

IVORRY CHAKA NATHARA PRANASHANTI, SUSILO /SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA DI ASEAN

Oleh:
BENEDICTA J.MOKALU DAN CAROLUS P. PARUNTU

Pusat Studi ASEAN, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi, Manado

BLOGIRWANTO

FLICKR.COM

Dua dari berbagai produk Indonesia yang telah menembus pasar ASEAN

Kawasan Asia kini telah tumbuh menjadi *global economic powerhouse*. Di dalam bukunya yang berjudul *Megatrend 2000*, James Naisbitt menyatakan dari segi jumlah penduduk, peluang dan daya serap pasar (*food, fashion*, dan *entertainment*) kawasan ASEAN dan Asia tidak kalah dengan belahan bumi lainnya. Tanpa melupakan pentingnya pasar-pasar tradisional seperti Eropa dan Amerika Serikat, sudah saatnya Indonesia mengambil langkah-langkah untuk lebih mengoptimalkan pasar ASEAN guna meningkatkan kemakmuran kawasan. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indonesia belum mampu secara optimal memanfaatkan pasar Asia karena masih minimnya kehadiran negara untuk menjalankan kebijakan tersebut. Untuk itu, pemerintah harus membenahi kebijakan ekonomi, hukum, politik dan menjawab harapan investor, seperti meningkatkan faktor-faktor produktivitas pekerja, penyediaan sarana memadai, produktivitas kerja, kepastian hukum, kemudahan berusaha, transparansi serta kemudahan birokrasi.

Dibandingkan dengan negara ASEAN lain, belanja Litbang Indonesia adalah yang terendah, hanya 0,2% per PDB.

Selain melakukan pembenahan domestik, Indonesia dapat melakukan dua hal untuk meningkatkan daya saingnya dalam rangka mengoptimalisasi pasar ASEAN. Pertama, Indonesia perlu mengambil langkah aktif dalam meningkatkan konektivitas ASEAN. Konektivitas berperan penting dalam memperlancar aliran barang, jasa, dan wisatawan. Salah satu contoh kasus langkah aktif pemerintah untuk meningkatkan konektivitas yang dapat memperlancar aliran barang, jasa, dan wisatawan adalah upaya pemerintah untuk membuka rute penerbangan langsung dari beberapa kota di Tiongkok ke Manado. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok ke Manado semenjak pertengahan tahun 2016.

Kedua, belajar dari Tiongkok dan AS, Indonesia dapat lebih fokus kepada riset dan inovasi untuk daya saing dan kualitas industri. Menurut Menristek Dikti Prof Muhammad Nasir, Kamis (15/9), alokasi belanja Litbang (penelitian dan pengembangan) di Indonesia masih sangat minim. Data tahun lalu, nilainya masih berkisar 0,2 persen (sekitar Rp 17 triliun) per-PDB. Jika dibandingkan dengan negara lain maka belanja Litbang Indonesia merupakan yang terendah di ASEAN. Untuk itu sudah saatnya pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran untuk pengembangan riset dan inovasi. Apabila Indonesia mampu meningkatkan konektivitas ASEAN dan meningkatkan daya saing industri melalui riset dan inovasi, Indonesia dapat memaksimalkan potensi lainnya yakni bonus demografi dan kondisi geopolitik dalam negeri. Diharapkan dengan modal tersebut Indonesia dapat menjadi aktor yang lebih berperan dalam membentuk arsitek regional.●

GAPYEAR.COM

Ha Long Bay, kawasan teluk berpemandangan indah dengan gugusan ribuan pulau. Salah satu destinasi wisata paling populer di Asia Tenggara.

Menikmati Wisata Vietnam

Keindahan alam yang dimiliki oleh Vietnam sangat beragam, mulai dari sawah hijau di bagian utara, hingga hamparan Delta Mekong yang menarik di bagian selatan. Selain itu, Vietnam juga memiliki objek wisata historikal mengingat negara lumbung padi ini memiliki sejarah panjang dan tradisi kuno.

Secara geografis, Vietnam berbatasan darat langsung dengan dua negara Asia Tenggara lainnya, yakni Kamboja dan Laos di sebelah barat, serta Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara. Daratan Vietnam didominasi oleh pegunungan dan hamparan delta, sehingga Vietnam sangat kental dengan pemandangan khas pedesaan. Lalu, letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan di sebelah timur, membuat Vietnam juga memiliki banyak objek wisata pantai.

Jika Anda berkunjung ke Vietnam, jangan lewatkan kunjungan ke beberapa tempat wisata berikut:

Ha Long Bay

Ha Long Bay merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Asia Tenggara. Terbentang sepanjang 120 Kilometer di Utara Vietnam, Ha Long Bay diterjemahkan sebagai *"Descending Dragons Bay"* (Teluk Naga). Daya tarik utama tempat ini adalah gugusan ribuan pulau yang masing-masing memiliki hutan tebal, gua-gua yang besar, serta terdapat desa nelayan yang mengapung.

Jika Anda berkunjung ke Ha Long Bay, Anda dapat menikmati keindahan Ha Long Bay dengan menyusuri teluk dengan kapal juga bermain kano mengelilingi teluk. Sambil mendayung di perairan yang tenang, anda dapat menikmati pemandangan alam yang hijau, menghirup udara segar dan mendengarkan alunan kicauan burung. Menyenangkan bukan?

Nha Trang

Nha Trang seringkali disebut sebagai tempat wisata paling indah di Vietnam. Daya tarik tempat ini terletak pada kota resor tepi laut dengan pe-

VIETNAMPREMIERTRAVEL.COM

Kota resor tepi laut Nha Trang.

mandangan pantai yang indah, air laut yang jernih, suhu yang bersahabat dan gugusan pasir putih yang terbentang luas. Nha Trang juga dikenal sebagai pusat *scuba diving* di Vietnam

Daya tarik pantai Nha Trang tidak berhenti pada siang hari saja. Pantai Nha Trang juga menjadi tujuan para wisatawan untuk berjalan kaki santai pada malam hari.

Thien Mu Pagoda

Pagoda Thien Mu (Hue) merupakan Pagoda tertinggi di Vietnam. Pagoda ini dibangun pada tahun 1601 pada masa pemerintahan Kaisar Nguyen. Berdiri kokoh menghadap Sungai Parfum, Pagoda Thien Mu dianggap sebagai simbol tidak resmi dari bekas ibukota kekaisaran.

Sungai Mekong

Sungai Mekong atau biasa disebut Delta Mekong merupakan sungai yang paling terkenal dan ikonik di Vietnam. Sungai ini juga melewati negara-negara tetangga, seperti Thailand, Laos, dan Kamboja. Dari Pulau Mekong, wisatawan dapat mengunjungi beberapa pulau yang ada di sekitar Delta Mekong, diantaranya adalah Pulau Phoenix, Pulau Dragon, Pulau Unicorn dan Pulau Turtle.

Hoi An

Dijuluki sebagai *Venice of Vietnam*, Hoi An merupakan sebuah kota kecil di Vietnam yang memiliki sebuah kanal sempit yang membelah kawasan Kota Tua. Kawasan Kota Tua Hoi An merupakan suatu kluster blok dan ruas jalan yang sengaja dikonservasi untuk mempertahankan arsitektur aslinya. Dulunya, Kota Hoi An merupakan kota pelabuhan internasional dan perdagangan pada abad ke -16 dan ke-17. Kota dengan luas sekitar 60 km per segi ini merupakan kota bersejarah yang telah diakui UNESCO sebagai salah satu *World Heritage*. Tak heran, kota Hoi An tidak pernah sepi dari pengunjung.

BESTPRICEVN.FR

Thien Mu Pagoda, pagoda tertinggi di Vietnam.

HEXAGONTRAVEL.CO.UK

Wisata menelusuri sungai Mekong, Vietnam.

Mui Ne

Selain pemandangan pegunungan, pantai dan bangunan bersejarah, Vietnam juga memiliki miniatur padang pasir/gumuk padang pasir yang bernama Mui Ne. Keistimewaan Mui Ne adalah gumuk pasir di sini memiliki beberapa warna yaitu merah *(Mui Ne Red Sand Dunes)* dan putih *(Mui Ne White Sand Dunes)*. Daya tarik utama tempat ini adalah pemandangan hamparan pasir ketika matahari terbenam.

Selain keenam tempat wisata terkenal di Vietnam tersebut, masih banyak tempat-tempat wisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi. Untuk lebih meningkatkan promosi pariwisata di Vietnam, pemerintah Vietnam secara resmi telah mencanangkan program promosi pariwisata nasional periode 2012-2015 dengan meluncurkan slogan "*Vietnam - Timeless Charm*" dengan memakai simbol bunga teratai. Logo ini melambangkan produk-produk utama wisata Vietnam yakni wisata bahari, ekowisata dan alam, wisata budaya dan sejarah, wisata menguak alam dan petualangan.

Vietnam National Administration of Tourism (VNAT) memperkirakan kunjungan wisatawan ke Vietnam pada tahun 2012 mencapai 6,5 juta jiwa, sedangkan wisatawan domestik sekitar 32 juta wisatawan dengan total pendapatan VND 150 triliun (sekitar US$ 7,20 miliar).

Sementara itu, pada tahun 2011 yang lalu, wisatawan yang berkunjung ke Vietnam tercatat 6 juta orang, di mana pendapatan dari sektor pariwisata mencapai VND 110 triliun. Pariwisata akan digalakan oleh pemerintah Vietnam, mulai dari fasilitas tempat wisata serta pelayanan kepariwisataan. Hal ini dilakukan sebagai upaya Vietnam agar pariwisata Vietnam makin berkembang dan dapat menjadi andalan utama dan penghasil devisa negara. Sebagai bagian dari integrasi dengan dunia, pariwisata Vietnam mengusahakan pembangunan pariwisata dengan 10 negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara di sub-wilayah Sungai Mekong – Hang. ●

NURINA NOVIARINI/UNIVERSITAS PADJADJARAN,
FATIMAH ALATAS/ DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

ASIAWEBDIRECT.COM

Restoran unik di Kota Tua Hoi An, Vietnam.

Maumere, Surga Kecil di Nusa Tenggara Timur

COCONUTBEACHGARDEN.COM

Coconut Garden Beach Hotel, salah satu lokasi penginapan dan wisata yang menarik di Maumere, Flores.

Maumere merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Wisatawan asing maupun domestik dapat menjangkaunya dengan mudah melalui Bandar Udara Frans Seda maupun Pelabuhan Lorens Say. Gugusan pulau dan pantai yang menawan bukan satu-satunya daya pikat Maumere. Hamparan hutan bakau, keramahan penduduk lokal, dan berbagai destinasi wisata alam yang tersebar di wilayah Maumere menjadi alasan wisatawan untuk datang dan kembali ke surga kecil ini.

Tim Redaksi Majalah Masyarakat ASEAN (MMA) menggunakan maskapai komersial untuk tiba di Maumere. Karena belum tersedia penerbangan langsung, sebagian besar wisatawan harus transit satu kali di Kupang atau Denpasar sebelum melanjutkan penerbangan ke Maumere. Begitu menginjakkan kaki di tanah Maumere, Tim Redaksi langsung disambut oleh hawa panas Flores. Pantai Sikka yang berwarna toska dan biru pekat membentang memancarkan pantulan sinar matahari, dan di ujung kota Maumere terlihat patung Bunda Segala Bangsa yang menjulang di atas Bukit Nilo.

Coconut Garden Beach Resort

Selama berada di Maumere, Tim Redaksi MMA menginap di *Coconut Garden Beach Resort,* kurang lebih sekitar 20 menit dari Bandara Frans Seda. Resort ini terletak persis di pinggir Pantai Sikka dan memiliki konsep yang unik. Kamar-kamar yang tersedia di *Resort* ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu kamar untuk pelancong *backpacker* serta bungalow cantik dan eksotik dengan beranda kecil yang dihiasi dengan kursi-kursi rotan dan *hammock*. Selain menikmati langsung pemandangan Pantai Sikka dari depan kamar, para pengunjung dapat melakukan reservasi untuk menikmati berbagai wisata air seperti *diving, water paddling, canoeing*, atau mengambil fasilitas paket wisata yang ditawarkan oleh pihak *Resort*.

Gereja Tua Sikka di Lepo Gete

Tim Redaksi MMA menyambangi Gereja Tua Sikka yang terletak di ujung selatan Maumere, sekitar 45 menit dari *Coconut Garden Beach Resort*. Menurut penjaga Gereja yang menyambut Tim Redaksi, Gereja Tua Sikka yang dibangun pada tanggal 24 Desember 1899 merupakan gereja tertua di Flores. Gereja ini dirancang oleh Antonius Dijkman Sj dan dibangun oleh Pastor Y. Engbers dengan dukungan Raja Sikka yang berkuasa pada saat itu, Yoseph Mbako Ximenes da Silva. Di dalam Gereja Tua Sikka terdapat prasasti bertuliskan nama pastor Le Cocq D'Armandville Sj. yang merupakan misionaris perintis di Sikka.

Pintu gerbang, kursi jemaat, hingga kolom kayu di atap Gereja Tua Sikka terbuat dari kayu berusia 117 tahun, meskipun warna catnya terlihat masih sangat cerah karena renovasinya sendiri baru saja dilakukan pada tahun 2014. Motif tenun ikat berwarna merah marun dan coklat yang menghiasi dindingnya menambah keindahan interior Gereja Tua Sikka.

Tidak jauh dari Gereja Tua Sikka terdapat tangga yang menjorok ke bawah, mengarahkan Tim MMA menuju Rumah Raja yang terletak tepat di pinggir Laut Sawu. Keberadaan Rumah Raja di kawasan ini membuatnya disebut sebagai kawasan Lepo Gete. Pengunjung yang penasaran dengan isi Rumah Raja dapat langsung masuk ke dalamnya karena Rumah Raja yang terbuat dari kayu dan beratapkan rumbai ini dalam keadaan kosong dan tidak lagi ditinggali. Melalui rangka kayu Rumah Raja yang sudah tidak dilapisi dinding utuh, pengunjung dapat menikmati angin dan deburan ombak dari Laut Sawu yang menakjubkan.

Tenun Ikat Karya Perempuan Desa Sikka

Tepat di depan Rumah Raja dan pinggiran Laut Sawu, sejumlah perempuan paruh baya dari Desa Sikka menggelar dagangan tenun ikat khas Maumere yang diwarnai dengan bahan-bahan alami. Pengunjung yang tertarik dapat langsung membeli sekaligus melihat proses pembuatan tenun ikat. Harga untuk satu lembar kain berukuran kurang lebih 2 meter berkisar antara 500.000 hingga 700.000 rupiah. Harga ini sangat sepadan dengan proses pembuatan tenun ikat yang sangat rumit dan memakan waktu cukup lama. Pengunjung dapat melihat proses pembuatan tenun ikat dari awal hingga akhir dengan membayar biaya sebesar 100.000 rupiah sebagai bentuk sumbangan adat untuk kelompok Ibu-Ibu penenun di Desa Sikka.

Ibu Maria yang pada saat itu sedang bertugas sebagai pemandu memberikan penjelasan rinci kepada Tim Redaksi MMA mengenai urutan tahapan dalam proses pembuatan tenun ikat. Mula-mula, bunga kapas dipetik dari tanaman kapas yang banyak tumbuh di Desa Sikka. Bunga-bunga kapas yang telah dikumpulkan, lalu digiling menggunakan alat tradisional bernama *ngeung* untuk memisahkan biji kapas dengan

SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

Gereja Tua Sikka berarsitektur Portugis masih menjulang kokoh di tanah Maumere.

serat kapas. Setelah digiling berulang kali, serat kapas yang telah terpisah dari bijinya dihaluskan dengan cara dipukul berulang kali menggunakan kayu. Serat-serat kapas yang sudah halus digulung menggunakan sebilah batang bambu kecil dan papan hingga menyerupai gulungan rokok. Tahapan selanjutnya adalah pemintalan gulungan-gulungan kapas hingga menjadi benang. Gulungan kapas dipintal menggunakan alat tradisional bernama *jata*. Gulungan ini tidak serta merta dapat terpintal sempurna menjadi benang. Penenun harus begitu tekun mengulang putaran pintal berkali-kali, apabila pintalan benang terputus maka proses pemintalan gulungan kapas harus diulangi dari awal hingga pintalan dapat menghasilkan bola pintalan yang kuat dan mulus. Satu lembar kain tenun ikat dengan lebar 1 meter dan panjang 3 meter membutuhkan kira-kira delapan bola pintalan.

Bola pintalan lalu dibentangkan satu demi satu dengan menggunakan bilah bambu untuk menemukan gulungan benang yang kurang sempurna. Penenun lalu menyematkan anyaman dari serat-serat daun gebang yang diperoleh dari daerah Liung ke dalam bentangan benang untuk membentuk pola tenunan. Setelah anyaman selesai dibentuk, tahapan selanjutnya adalah mewarnai benang dengan cara mencelupnya ke dalam ramuan dari bahan-bahan alami. Warna merah diperoleh dari akar mengkudu, sedangkan warna biru indigo diperoleh dari daun nila. Kedua bahan yang telah ditumbuk halus dicampur dengan penguat warna seperti daun loba atau kapur sirih. Penenun akan merendam benang semalaman untuk mendapatkan warna yang lebih pekat. Setelah proses pewarnaan selesai, benang dibentangkan kembali agar saat ditenun ikatan motifnya tetap lurus dan rapi. Jalinan benang ditenun sedemikian rupa menggunakan alat tradisional dari kayu dengan cara dianyam dengan jari dan didorong menggunakan kaki. Proses penenunan ini sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 minggu.

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Hutan Bakau Baba Akong yang berpadu dengan Laut Sikka dapat dinikmati oleh pengunjung dari atas suar pemantau dari bambu yang dibuat sendiri oleh Baba Akong dan anaknya.

Hutan Bakau Baba Akong

Mirip seperti di Bali, Maumere memiliki Hutan Bakau atau *Mangrove Information Centre (MIC)* di Desa Reroroja. Hutan Bakau yang dikelola oleh Victor Emanuel Raiyon atau yang lebih dikenal dengan Baba Akong terletak di tepian pesisir Pantai Sikka yang berpasir hitam, menandakan adanya gunung berapi di sekitar wilayahnya. Setelah gempa dan tsunami menggempur Maumere dan meluluhlantakkan desanya pada tahun 1992, Baba Akong mencoba menanam bibit-bibit pohon bakau di lahan yang dimilikinya. Inspirasi untuk menanam bakau timbul karena Baba Akong memperhatikan bahwa Desa Fata yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya tidak mengalami kerusakan berarti karena wilayah pantainya terlindungi barisan pohon bakau.

Baba Akong mengelola 7.000 pohon bakau di lahan seluas 70 hektar secara swadaya. Di dalam Hutan Bakau ini terdapat 15 jenis pohon bakau yang masing-masing memiliki keunikan dan manfaat tersendiri. Selain mencegah abrasi pantai dan melindungi wilayah pesisir dari gelombang, beberapa jenis pohon bakau juga dapat dimanfaatkan untuk obat sengatan ikan pari, makanan ikan, campuran untuk makanan pokok, dan menjadi ekosistem bagi sejumlah hewan seperti lebah penghasil madu, burung, dan kepiting.

Usaha Baba Akong untuk menanami wilayah pesisir dengan pepohonan bakau bukan perkara mudah. Pada awalnya masyarakat sekitar menganggap upaya yang dilakukan oleh Baba Akong sia-sia karena beranggapan bahwa pohon bakau tidak akan dapat hidup lama di lahan berpasir. Selain itu, masyarakat juga berpikir bahwa menanami wilayah pesisir dengan pohon bakau tidak akan mendatangkan manfaat, terutama dari segi finansial. Hal ini tidak menyurutkan langkah Baba Akong untuk terus mengelola hutan bakau yang dimilikinya. Baba Akong bersama dengan istrinya hingga saat ini masih dengan tekun membersihkan hutan bakau dan pantai di sekitarnya dari sampah-sampah yang dibawa oleh pengunjung atau gelombang pantai.

Kegigihan Baba Akong membuahkan hasil ketika akhirnya film dokumenter mengenai pahit manit kisahnya ketika mengelola hutan bakau bertajuk "Prahara Tsunami Bertabur Bakau" memenangkan penghargaan dari salah satu acara televisi swasta nasional pada tahun 2008. Cerita indah Baba Akong terus bergulir ketika akhirnya ia dan istrinya diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden RI pada tahun 2009. Setelah itu, Baba Akong kerap menjadi rujukan berbagai pihak ketika mengangkat isu mengenai pemanfaatan hutan bakau, masalah lingkungan, maupun wisata di Maumere. Rumahnya kerap didatangi oleh pengunjung dari kalangan akademisi, media, maupun masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan pada bulan September 2016 ini, Hutan Bakau Baba Akong akan menjadi tempat berlangsungnya Maumere *Jazz Fiesta*.

CAPAMAUMERE.COM

Pantai Pulau Pangabatang, salah satu lokasi incaran para penyelam dari dalam maupun luar negeri.

Pulau Pangabatang

Kurang lengkap rasanya bila melancong ke Maumere tanpa merasakan keindahan pantai dan lautnya. Selain Labuan Bajo, Maumere merupakan salah satu *diving spot* yang cukup terkenal di Flores. Salah satu tempat yang menjadi incaran penyelam dari dalam negeri maupun mancanegara adalah laut di sebelah selatan Pulau Pangabatang. Para penyelam dapat menemukan kumpulan ikan, karang, dan hiu yang berenang di kedalaman 24 hingga 30 meter. Namun perlu diingat bahwa belum banyak fasilitas menyelam atau *snorkling* yang tersedia di sekitar Pulau Pangabatang maupun Maumere. Oleh karena itu, pelancong yang berniat ingin menjelajahi kedalaman laut di sekitar Maumere disarankan untuk membawa *snorkel* dan peralatan menyelam sendiri.

Pelancong yang ingin bersantai di pinggir pantai berpasir putih di Pulau Pangabatang dapat mengaksesnya dengan cara menyewa perahu dari nelayan lokal di Nanghale atau mengaksesnya melalui Pantai Sikka bila air sedang tidak surut. Perjalanan dari Maumere menuju Nanghale memakan waktu sekitar 1 jam. Infrastruktur jalan menuju Nanghale sudah sangat baik dengan pemandangan yang cukup memanjakan mata. Di kanan kiri jalan akan terlihat Gunung Egon yang menjulang tinggi, hamparan perkebunan yang subur, dan perkampungan lokal. ●

ANDI D. YUDYACHANDRA
FALENTINO A. MARA
IVORRY CHAKA NATHARA PRANASHANTI
SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

ASEAN CORNER DI *TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL*

Gegap gempita masyarakat dan wisatawan mancanegara memeriahkan suasana *Tomohon International Flower Festival* (TIFF) 2016 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tomohon bersama Kementerian Pariwisata RI. Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN-Indonesia memberikan kontribusi melalui *booth ASEAN Corner* untuk memberikan informasi dan edukasi publik tentang Masyarakat ASEAN kepada pengunjung TIFF 2016.

ANTARA FOTO

PTRI ASEAN

Berbagai kegiatan unik di acara *Tomohon International Flower Festival* 2016. Kemlu RI bersama Setnas ASEAN-Indonesia turut meramaikan acara melalui *booth ASEAN Corner.*

Tomohon merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kota berparas cantik ini menawarkan berbagai alternatif destinasi wisata alam seperti Gunung Lokon, Gunung Mahawu, Danau Linow, perkampungan bunga di Desa Kakaskasen, dan ekowisata di Desa Rurukan. Kombinasi antara kontur wilayah yang berbukit dan hawa sejuknya membuat Tomohon tumbuh menjadi lokasi pengembangan florikutura. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tomohon rutin mengadakan acara tahunan *Tomohon International Flower Festival* (TIFF) setiap bulan Agustus. Acara tahunan ini diselenggarakan untuk menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara datang ke Tomohon.

Tahun ini, Pemerintah Kota Tomohon dan Kementerian Pariwisata kembali menggelar TIFF pada tanggal 8-12 Agustus 2016. TIFF 2016 diisi dengan rangkaian acara parade kendaraan hias, kontes ratu bunga, pameran bunga, *bazaar*, dan pagelaran seni budaya. Acara ini terbilang sukses karena mampu menghimpun kontribusi dari berbagai kalangan yaitu dari pihak pemerintah dan non pemerintah antara lain; Kementerian Pertanian, BKKBN, Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Karo, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kota Gorontalo, Pertamina, Lippo Group, Volvo, JTV, PT MSM, Bank Sulawesi Utara, dan Bank BRI. Selain itu, terdapat pula beberapa partisipan dari negara sahabat seperti Jepang, Tiongkok, Singapura, dan Australia, turut meramaikan parade tersebut.

Pada penyelenggaraan TIFF kali ini, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Setnas ASEAN-Indonesia berkesempatan untuk ikut memeriahkan acara melalui *booth ASEAN Corner*. *ASEAN Corner* merupakan salah satu media yang cukup efektif untuk mendisemi–nasikan informasi dan melakukan edukasi publik mengenai ASEAN. *Booth* ini menyediakan informasi mengenai kerja sama ASEAN kepada masyarakat umum yang menjadi pengunjung maupun peserta TIFF melalui dialog dengan petugas *booth*, brosur, infografis, buku, dan Majalah Masyarakat ASEAN. Selain itu, untuk meningkatkan minat dan mengetahui sejauh mana pemahaman pengunjung tentang ASEAN, dilaksanakan kuis berhadiah, serta pembagian kuesioner. Pelaksanaan kegiatan *ASEAN Corner* berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung yang mendatangi *booth ASEAN Corner* dan meminta bahan informasi mengenai ASEAN.●

ANDI DIRGAHAYU YUDYACHANDRA, IVORRY CHAKA NATHARA P./SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

KULIAH UMUM MEA DI UNIVERSITAS DARUL ULUM JOMBANG

UNIPDU.AC.ID

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum. Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kemlu hadir sebagai pembicara seminar nasional mengenai MEA di kampus ini pada 10 Agustus 2016 lalu.

Kunci utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah daya saing. Untuk berdaya saing di dalam ASEAN, Universitas Darul 'Ulum perlu membedakan diri dengan entitas pendidikan lain sehingga memberikan posisi khusus Darul 'Ulum di dalam benak setiap masyarakat. Demikian pesan yang disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Ina Hagniningtyas Krisnamurthi pada acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Studi ASEAN, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) di Kampus Unipdu Jombang tanggal 10 Agustus 2016. Kegiatan yang juga disertai dengan pameran foto ASEAN ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-49 ASEAN di kabupaten Jombang. Kegiatan seminar nasional dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari kalangan mahasiswa, dosen, dan pemerintah kabupaten Jombang.

Pada seminar tersebut, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN menyampaikan bahwa integrasi kawasan ASEAN tidak berhenti pada akhir tahun 2015. MEA bukan merupakan suatu peristiwa, tetapi suatu proses yang panjang yang akan berlanjut setelah tahun 2015 dengan adanya MEA 2025. Setelah tahun 2025, MEA pun juga akan terus mengalami perkembangan integrasi. MEA juga tidak bergerak sendiri di dalam Masyarakat ASEAN karena Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu Masyarakat Politik Keamanan, Masyarakat Ekonomi dan Masyarakat Sosial Budaya. Ketiga pilar tersebut saling terkait, saling memperkuat satu sama lain. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi membutuhkan stabilitas kawasan dari Masyarakat Politik Keamanan dan kualitas SDM melalui kerja sama pendidikan dari Masyarakat Sosial Budaya.

Indonesia sepatutnya tidak lagi menilai MEA sebagai hambatan namun MEA merupakan peluang. Oleh karena itu, perubahan *mindset* perlu dilakukan agar kita dapat melihat MEA sebagai peluang dengan munculnya pasar-pasar baru bagi produk Indonesia. Indonesia juga perlu memahami bahwa kerja sama ekonomi ASEAN sesungguhnya berbeda dengan integrasi ekonomi di Uni Eropa. Tiap kerja sama yang dilakukan di ASEAN dapat dilihat pula sebagai refleksi kesiapan Indonesia.

Pada era globalisasi dan pasar bebas saat ini, kompetisi daya saing produk nasional sangatlah penting. Para pelaku usaha perlu untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dengan mengikuti standar industri yang ada. Para pelaku usaha harus sadar pentingnya standarisasi seperti SNI, sertifikasi halal, dan pendaftaran ke BPOM agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi, berdaya agar bersaing di pasar ASEAN.●

IKA ANNISAA FARISTA
DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

MEMBUMIKAN ASEAN, KEMLU GELAR JALAN SEHAT DAN PAMERAN FOTO DI BANDUNG

Masyarakat Bandung dan sekitarnya, meramaikan kegiatan Jalan Sehat Keluarga yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-49 ASEAN.

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Lebih dari lima ribu warga Bandung dan sekitarnya memadati halaman depan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate) pada Minggu (28/8) pagi untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat Keluarga ASEAN yang diadakan oleh Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-49 ASEAN melalui kerja sama dengan Pemprov Jabar dan Lita FM. Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan berkesempatan untuk melepas secara langsung para peserta jalan sehat.

Dalam sambutannya, Menlu Retno menyampaikan bahwa ASEAN adalah organisasi *people-driven, people-center* dan *people-oriented* sehingga keberadaannya harus memberikan manfaat bagi rakyat ASEAN dan rakyat Indonesia.

"Kini dengan telah dimulainya Masyarakat ASEAN, ASEAN merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju," ungkap Menlu Retno.

Semangat Kemlu dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat ASEAN disambut baik oleh Gubernur Jabar. Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kemlu yang telah menggelar kegiatan jalan sehat, dan memberikan informasi mengenai peningkatan jumlah turis asing di Jabar.

"Alhamdulillah, Bu Menteri, dalam dua tahun terakhir ini jumlah kunjungan turis luar negeri ke Jawa Barat terus meningkat, peningkatannya signifikan khususnya ke Bandung Raya ini," pungkasnya.

Kegiatan jalan sehat dimeriahkan dengan senam *Zumba*, pentas seni budaya ASEAN dan *bazaar* kuliner negara anggota ASEAN. Selain kegiatan jalan sehat, peringatan HUT ke-49 ASEAN di Bandung juga disemarakkan dengan Pameran Foto bertema "*ASEAN Community 2015 and Beyond*" di Museum Konferensi Asia Afrika selama seminggu penuh (27/8-3/9). Pameran foto ini merupakan rangkaian dari kegiatan serupa yang diselanggarakan di Museum Seni Rupa dan Keramik, Kawasan Kota Tua Jakarta (6-13/8) yang dibuka secara resmi oleh Menlu RI pada Minggu (6/8).

Turut berpartisipasi dalam kegiatan ini Dirjen KSA beserta pejabat eselon II di lingkungan Kemlu, Duta Besar Laos untuk ASEAN Latsamy Keomany, Wakil Tetap Indonesia untuk ASEAN, Dubes Rahmat Pramono, Dirjen Amerika-Eropa, Muhammad Anshor, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana, serta para pejabat terkait di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

Jalan Sehat Keluarga ASEAN dan Pameran Foto ini merupakan salah satu upaya mendiseminasikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ASEAN sehingga masyarakat dapat berkontribusi dan merasakan manfaat nyata dalam era Masyarakat ASEAN. Kemlu berharap kegiatan ini dapat merangkul seluruh elemen masyarakat dan menjadi suatu wahana berkumpul bagi keluarga. Tema keluarga dipilih agar semangat dan kesadaran mengenai ASEAN tumbuh dan mengakar pada setiap keluarga di indonesia.●

RAHMA JUWITA/ SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

PERINGATAN HUT ASEAN KE-49 DI GEDUNG SEKRETARIAT ASEAN, JAKARTA

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Sekretaris Jenderal ASEAN berpose bersama sejumlah tamu undangan dalam acara peringatan HUT ASEAN ke-49 di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan pidato pembukaan dalam acara HUT ASEAN ke-49 yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN (ASEC) di Jakarta.

Sejumlah pemuda dari Sekolah Pilar Bangsa menampilkan seni angklung dalam acara peringatan HUT ASEAN ke-49 di kantor Sekretariat ASEAN.

FOTO-FOTO: ASEAN.ORG

PAMERAN FOTO "*ASEAN COMMUNITY 2015 AND BEYOND*"

Menteri Luar Negeri RI, Retno L. P. Marsudi dan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares tengah mengamati foto-foto yang ditampilkan dalam acara pameran foto "ASEAN Community 2015 and Beyond" di Museum Seni Rupa dan Keramik, Jakarta.

Bendera kesepuluh negara anggota ASEAN berkibar di halaman Museum Seni Rupa dan Keramik, tempat berlangsungnya acara pameran foto "ASEAN Community 2015 and Beyond" untuk memperingati HUT ASEAN ke-49.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan sejumlah tamu undangan nampak antusias mengamati foto-foto yang ditampilkan dalam acara pameran foto "ASEAN Community 2015 and Beyond" di Museum Seni Rupa dan Keramik, Jakarta.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Ashariyadi dan Pendiri London School of Public Relations (LSPR), Prita Kemal Gani mengamati salah satu foto yang dipamerkan dalam acara pameran foto "ASEAN Community 2015 and Beyond" di LSPR, Jakarta. Kemlu RI mendorong agar seluruh Pusat Studi ASEAN (PSA) yang tersebar di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran foto "ASEAN Community 2015 and Beyond", sebagai bentuk diseminasi informasi dan edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai ASEAN.

FOTO-FOTO: SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

JALAN SEHAT KELUARGA ASEAN, BANDUNG 28 AGUSTUS 2016

Menteri Luar Negeri RI bersama dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri turut berpartisipasi bersama dengan ribuan masyarakat umum dalam acara Jalan Sehat Keluarga ASEAN untuk memperingati HUT ASEAN ke-49.

Menteri Luar Negeri menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara Jalan Sehat Keluarga ASEAN untuk memperingati HUT ASEAN ke-49 di halaman kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), Bandung. Dalam sambutannya, Menlu menekankan bahwa ASEAN merupakan organisasi yang people-centered sehingga tidak boleh memiliki jarak dengan masyarakat. Acara peringatan HUT ASEAN ke-49 diselenggarakan sebagai upaya untuk mendekatkan ASEAN dengan masyarakat Indonesia.

Pelepasan balon oleh Menteri Luar Negeri dan Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam pembukaan acara Jalan Sehat Keluarga ASEAN di Bandung.

Menteri Luar Negeri RI turut serta bersenam zumba bersama dengan masyarakat Bandung sebelum membuka acara Jalan Sehat Keluarga ASEAN.

Para peserta Jalan Sehat Keluarga ASEAN memenuhi jalan-jalan di kota Bandung.

Masyarakat umum tampak sangat antusias mengikuti acara Jalan Sehat Keluarga ASEAN, hingga memadati jalan Diponegoro, Bandung.

RAPAT PLENO SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN-INDONESIA

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN membuka Rapat Pleno Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia yang berlangsung pada tanggal 8 Agustus 2016 di Jakarta.

Suasana Rapat Pleno yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga anggota Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN-Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Luthfi Rauf sebagai salah satu narasumber dalam Rapat Pleno Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN-Indonesia menyampaikan paparan mengenai kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN. Rapat Pleno (Setnas) ASEAN-Indonesia juga diisi oleh sejumlah narasumber seperti; Deputi Kerja Sama Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN, Kementerian Luar Negeri; dan Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/BAPPENAS.

FOTO-FOTO: SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

Upaya penguatan sinergi nasional melalui kegiatan Konsultasi Nasional antar Instansi Pumpunan (Focal Point) dan Pemangku Kepentingan dalam rangka Implementasi Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025", yang diselenggarakan pada 29-31 Agustus 2016 di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

Suasana Simulasi Sidang ASEAN yang diikuti oleh 40 orang mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar.

Latih Kemampuan Negosiasi, Kemlu Selenggarakan Pelatihan Simulasi Diplomasi Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN pada 4-5 Agustus 2016 bertempat di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri.

FOTO-FOTO: SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

SEKTOR PARIWISATA GORONTALO BERSIAP KUASAI PASAR ASEAN

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Ina H. Krisnamurthi, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN saat menjadi narasumber di kegiatan penyampaian saran kebijakan dengan tema Laju Konektivitas Bagi Penguatan Daya Saing Pariwisata di Provinsi Gorontalo dalam Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berdaya untuk Bersaing, Kualitas dan Kuantitas adalah kunci utama. Demikian seruan Ina H. Krisnamurthi, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN (KSEA), Kemlu RI, kepada para peserta kegiatan penyampaian saran kebijakan dengan tema "Laju Konektivitas Bagi Penguatan Daya Saing Pariwisata di Provinsi Gorontalo dalam Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". Acara yang diselenggarakan di Kwandang, Gorontalo Utara, 20 Juli 2016 ini diadakan oleh Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo ini dihadiri oleh sekitar 150 pemangku kepentingan di seluruh Gorontalo.

Turut hadir sebagai narasumber adalah wakil dari Deputi Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata; Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan Forum Kawasan Timur Indonesia. Lebih lanjut, Direktur KSEA menyampaikan bahwa aspek penting dalam pariwisata adalah investasi, sumber daya manusia (SDM), jaminan keamanan, dan promosi bersama. Ditekankan bahwa SDM seharusnya tidak hanya berpendidikan namun juga berketerampilan. Gorontalo harus dapat mengaplikasikan apa yang telah menjadi kesepakatan di ASEAN yaitu menjadi tujuan wisata yang berkualitas tinggi yang mampu menawarkan pengalaman yang unik, beragam, memegang teguh nilai kebudayaan, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan sektor pariwisata yang inklusif.

Kesepuluh negara anggota ASEAN telah menyepakati "*ASEAN as a single destination*" (destinasi tunggal) dan "*Pakse Declaration on Ecotourism*". Oleh karena itu, ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk dapat meraih target pengembangan industri wisata yang terintegrasi, dengan memanfaatkan destinasi unggulan di bidang ekowisata khususnya wisata bahari. Lebih lanjut pengembangan destinasi wisata bahari diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tingkat ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata.

Upaya meningkatkan daya saing pariwisata Gorontalo pada umumnya dan Gorontalo Utara pada khususnya ini, sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dengan visi "Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing tahun 2020". Diharapkan hal ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk lebih menjadikan Gorontalo sebagai daerah tujuan wisatawan nasional dan internasional khususnya wisatawan ASEAN. Terutama mengingat potensi pariwisata Gorontalo yang memiliki beberapa obyek wisata unggulan.

Rangkaian kegiatan di Gorontalo tersebut didahului dengan *talkshow* di Radio Suara RH dan dilanjutkan dengan talkshow di TVRI Gorontalo dan RRI Gorontalo. Dari interaksi dengan masyarakat secara langsung pada ketiga *talkshow* dimaksud, tampak apresiasi dan tanggapan positif masyarakat Gorontalo terhadap MEA serta antusiasme para pemangku kepentingan dalam memanfaatkan MEA. Hal ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terus berbenah diri untuk memajukan sektor pariwisatanya guna menguasai pasar ASEAN. ●

DESITA NUNINGHARJANTI /DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

INDONESIA NOMINASIKAN KEPULAUAN SERIBU DAN TAMAN WAKATOBI SEBAGAI *ASEAN HERITAGE PARKS*

PULAUSERIBU.COM

Keindahan alam Pulau Seribu, bersama Taman Nasional Wakatobi, kini tengah dinominasikan sebagai *ASEAN Heritage Parks* oleh pemerintah Indonesia.

Dua Taman Nasional Laut di Indonesia yaitu Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Taman Nasional Wakatobi dinominasikan sebagai *ASEAN Heritage Parks* (AHP). Pengajuan tersebut merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung upaya ASEAN dalam memelihara dan mempromosikan kawasan konservasi, sesuai dengan A*SEAN Declaration on Heritage Parks and Reserves* tahun 1984.

AHP dibentuk dengan tujuan untuk melestarikan dan menjunjung warisan alam yang melimpah di kawasan Asia Tenggara. Pemilihan situs AHP berdasar pada keunikan dan keanekaragaman suatu warisan alam. AHP ini dibentuk melalui penandatanganan *ASEAN Declaration of Heritage Parks and Reserves* pada tanggal 29 November 1984, oleh enam negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Bersamaan dengan penandatanganan deklarasi, keenam negara tersebut menunjuk 11 situs.

Secara umum, AHP memiliki lima prinsip dasar yaitu: memelihara proses-proses ekologis yang penting dan sistem pendukung kehidupan; melestarikan keanekaragaman genetik; memelihara keanekaragaman tumbuhan dan hewan di dalam habitat alaminya; memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya; serta membuka akses untuk rekreasi, pariwisata, pendidikan dan penelitian untuk membuat masyarakat mengerti tentang pentingnya sumber daya alam.

Program-program AHP didanai oleh *ASEAN Centre for Biodiversity* (ACB). ACB dibentuk pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antara negara anggota ASEAN, pemerintah negara yang bersangkutan, kawasan, dan organisasi internasional dalam hal konservasi. Program yang didanai oleh ACB adalah *Biodiversity and Climate Change Project* (BCCP). BCCP bertujuan untuk membantu negara anggota ASEAN dalam mengembangkan dan memperkuat strategi dalam mengatasi permasalahan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. BCCP fokus pada pengelolaan ekosistem dan meningkatkan keuntungan dari segi ekonomi terkait keanekaragaman hayati.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan *Small Grants Programme* (SGP) yang didanai oleh bank pembangunan Jerman, yaitu *Kreditanstaltfür Wiederaufbau* (KfW). Tujuan dari SGP adalah untuk memperkuat pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan kebutuhan dasar penduduk lokal di kawasan ASEAN. Sejak MoU ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia telah melakukan kerja sama yang intensif dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses finalisasi SGP.

TEKOOO.COM

Taman Nasional Wakatobi, keindahan alam bawah lautnya sudah dikenal hingga ke manca negara.

Terkait pengajuan Indonesia untuk Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Taman Nasional Wakatobi sebagai AHP, Indonesia telah menyampaikan dokumen terkait nominasi kepada ACB selaku Sekretariat AHP. ACB bertanggungjawab dalam meninjau nominasi AHP dengan menilai berdasar kriteria berikut:

1. *Ecological completeness*: Proses ekologis yang utuh dan kapabilitas untuk menghidupkan kembali dengan intervensi manusia yang minim.
2. *Representativeness*: Mewujudkan berbagai ekosistem dan spesies yang mewakili atau khas dari daerah tertentu.
3. *Naturalness*: Sebagian besar situs yang menjadi nominasi harus berada dalam kondisi yang alami.
4. *High conservation importance*: Harus memiliki signifikansi global untuk melakukan konservasi terhadap spesies tertentu, serta mempromosikan akan pentingnya keberadaan alam.
5. *Legally Gazetted Area*: Harus sudah teridentifikasi secara hukum atau instrumen legal lainnya yang telah disetujui oleh negara anggota ASEAN.
6. *Approved Management Plan*: Harus memiliki rencana pengelolaan yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang dari masing-masing negara anggota ASEAN.

Pengusulan dua taman wisata tersebut sebagai AHP menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya ASEAN dalam memelihara dan mempromosikan kawasan konservasi, sesuai dengan *ASEAN Declaration on Heritage Parks and Reserves* tahun 1984. Kementerian Luar Negeri RI perlu mengawal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selaku *focal point* Komite AHP dalam memastikan dilaksanakannya seluruh proses nominasi yang harus dilakukan oleh Indonesia.

Pada tanggal 27 Juli 2016 ACB menunjuk Taman Nasional Way Kambas sebagai AHP yang ke-36 sebagai penutup rangkaian kegiatan *The Fifth Meeting of AHP Committee*. Piagam penetapan Taman Nasional Way Kambas diserahkan secara langsung oleh Direktur Eksekutif ACB kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Para delegasi diberi kesempatan untuk mengunjungi induk badak Ratu dan anak keduanya bernama Delilah yang lahir pada bulan Mei 2016 di Pusat Perlindungan Badak Sumatera, Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur. Penetapan Taman Nasional Way Kambas sebagai AHP yang ke-36 atau yang ke-4 di Indonesia setelah Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Lorentz, menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Penetapan ini diharapkan akan dapat mendukung dan meningkatkan upaya nasional untuk pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia.●

ANDANA RHEZA/MAHASISWA HUBUNGAN INTERNASIONAL UI, FATIMAH ALATAS/DIT.KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

KEWARGANEGARAAN GANDA UNTUK SIAPA?

Dalam arti sederhana diaspora adalah perantau yaitu orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke daerah atau ke negara lain guna mencari kehidupan yang lebih baik, ketimbang di daerah atau negaranya sendiri. Sedangkan Terminologi diaspora Indonesia berdasarkan Dino Patti Djalal merujuk pada warga negara dalam situasi dan kondisi sebagai berikut, Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, Warga Negara Indonesia yang sudah menjadi Warga Negara Asing (eks. Warga Negara Indonesia), Warga Negara Asing yang memiliki pasangan Warga Negara Indonesia beserta keturunannya dan juga Warga Negara Asing yang memiliki perhatian khusus (simpati) terhadap Negara Republik Indonesia.

Sedangkan istilah Dwi Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai Kewarganegaraan Ganda, yaitu seseorang yang karena latar belakang situasi atau kondisi tertentu, memiliki status kewarganegaraan ganda. Hal ini bisa terjadi karena dianutnya asas–asas yang menjadi dasar penentuan kewarganegaraan seseorang. Yaitu, asas *ius sanguinis*, yang mengakui kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya; dan asas *ius soli*, yang menetapkan prinsip bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat (negara) kelahirannya.

Harus diakui, pada awalnya Indonesia tidak mengenal konsep Dwi Kewarganegaraan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, tidak diatur kemungkinan adanya Dwi Kewarganegaraan dan penyelesaiannya. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memperkenalkan konsep Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Artinya, terhadap anak yang karena situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya memiliki Dwi Kewarganegaraan, diberi kesempatan untuk memilih. Hak untuk memilih itu berlaku ketika anak tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kesempatan untuk memutuskan memilih kewarganegaraan diberikan selama 3 tahun. Artinya sampai dengan usia 21 tahun anak tersebut harus telah memutuskan pilihannya. Perlu ditegaskan bahwa Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 9 mengenai permohonan kewarganegaraan yang mensyaratkan bahwa pemberian kewarganegaraan RI tidak menjadikannya sebagai orang yang berkewarganegaraan ganda. Ketentuan Pasal 9 huruf f ini menarik untuk dicermati sehubungan dengan gagasan kebijakan Kewarganegaraan Ganda yang diminta oleh diaspora Indonesia. Artinya jika kebijakan itu akan diberlakukan dan menjadi keputusan politik negara, maka Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 perlu diubah.

Dwi Kewarganegaraan yang dibahas dalam tulisan ini lebih merupakan gagasan ideal untuk memfasilitasi para Diaspora Indonesia agar dapat lebih berperan optimal dalam pembangunan nasional. Sebagai contoh kasus dapat dilihat dari kasus Arcandra Tahar, seorang praktisi di bidang Hidrodinamik dan *offshore* yang sempat menjabat sebagai Menteri ESDM selama 20 hari dan harus dilengserkan karena memiliki kewarganegaraan ganda. Sangat disayangkan apabila Arcandra Tahar kembali ke Amerika Serikat dan ilmu yang dimiliki oleh Arcandra Tahar tidak dapat dimanfaatkan untuk membangun sektor energi di Indonesia. Ini merupakan suatu *brain drain* bagi bangsa Indonesia.

Dan, dalam hal ini sekali lagi India memberi contoh, ketika banyak negara, melakukan kebijakan untuk mencegah atau paling tidak mempersulit warga negaranya yang ahli dan potensial untuk bekerja di luar negeri, India justru mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Ketika banyak orang India menjadi tenaga kerja ahli bidang teknologi informasi di Amerika Serikat, India dapat menjadikan hal itu sebagai tawaran untuk membangun hubungan baik dengan AS di bidang diplomasi dan ekonomi (Bhagawati, 2004:215). Sementara di negaranya sendiri, India menerapkan kebijakan *Overseas Citizenship of India* (OCI). Pemegang OCI yang pernah menjadi warga negara India dapat melakukan perjalanan ke India tanpa keharusan memiliki Visa. Selain itu, pemegang OCI juga dapat bekerja tanpa disertai dengan izin kerja walaupun tetap ada batasan-batasan tertentu.

Contoh lain misalnya, adalah Mexico. Pada awalnya negara ini hanya menerapkan dwi kewarganegaraan terbatas pada tahun 1996 hingga tahun 2003, yaitu *non-voting Mexican cultural Nationality*, dengan restriksi pada kepemilikan properti. Lalu, setelah tahun 2003 dwi kewarganegaraan diperluas dengan kekecualian akan hak pilih, yang hanya diberikan jika yang bersangkutan secara fisik hadir di Mexico untuk memilih.

Ada banyak alasan mengapa kemudian prinsip *dual citizenship* masih menjadi polemik di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah kekhawatiran terhadap gelombang migrasi besar dari negara-negara berpendapatan rendah. Pasalnya, keberadaan para imigran berpotensi melunturkan identitas lokal. Dalam konteks ini, para imigran pun kemudian dianggap sebagai ancaman ketimbang memberi peluang dan manfaat bagi negaranya. Dengan alasan itu, banyak negara-negara tujuan para imigran yang membuat sejumlah aturan keimigrasian dan kewarganegaraan yang super ketat. Dampak negatif lainnya yang dapat timbul adalah keamanan nasional akan semakin rentan karena dapat menimbulkan kecurigaan terhadap orang yang mempunyai dua kewarganegaraan ganda apalagi dalam Kasus Arcandra Tahar di mana dia memegang peran vital dalam negosiasi industri migas di Indonesia.

Status kewarganegaraan itu bukan sekedar memberikan *sense of belonging*, tetapi lebih dari itu, status hukum yang memberikan hak–hak hukum, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang–undangan.

Di Amerika Serikat, meskipun prinsip *dual citizenship* telah diadopsi ke dalam peraturan keimigrasian, namun dalam praktiknya terdapat banyak aturan yang cukup ketat, terutama terkait dengan kontribusi secara militer dan pajak. Sementara negara-negara asal imigran, seringkali merasa takut bila gelombang migrasi dari negaranya akan mengurangi sejumlah tenaga pekerja yang memiliki keunggulan dalam *skill* dan pengetahuan (*brain drain*). Dan contoh paling nyata adalah di India, di mana sejumlah ahli mesin (*engineer*) lulusan IIT (*Indian Institute of Technology*) secara berbondong-bondong menyerbu Amerika Serikat dan negara maju lain di Eropa. Para pengamat di India pada waktu itu mengatakan, bila gelombang migrasi tersebut telah menghilangkan modal intelektual yang berharga dan melegitimasi istilah *brain drain* yang berkembang. Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Mashelkar, mantan Direktur *Indian National Academy of Science*, bahwa negara berkembang sejatinya tak perlu terlalu risau terhadap fenomena *brain drain*. Menurutnya, *brain drain* itu adalah non sense. Yang ada adalah *brain circulation*, yaitu fenomena yang muncul karena adanya dorongan *curiosity* yang kuat dalam setiap diri petualang untuk mengaktualisasikan impiannya (*Weekly Brief*, No.31 Oktober 2012). Dan nyatanya, fenomena *brain drain* yang dianggap menakutkan, justru sebaliknya malah menguntungkan. Dimana pada akhir 90-an dan menjelang abad 21 India malah dihadapkan dengan arus besar *u-turn circulation*, yaitu kembalinya para imigran dari perantauan, dari tempat pencarian mimpi-mimpi mereka di Amerika dan Eropa. Dalam konteks sebuah negara, maka India menjadi negara yang cukup cepat dihampiri oleh *u-turn circulation*. Sehingga *brain drain* yang ditakutkan pun tak pernah ada, yang ada adalah *brain circulation*, yaitu potensi besar, modal intelektual, dan juga modal jaringan (*network circulation*) untuk kemajuan negerinya.

Perlu ditegaskan kembali bahwa permasalahan yang perlu dijawab adalah kebutuhan untuk memberikan status hukum yang jelas kepada diaspora. Status hukum itu adalah status kewarganegaraan Indonesia yang diberikan kepada mereka yang notabene telah memiliki status kewarganegaraan di negara tempat ia berdomisili. Betapapun status kewarganegaraan itu bukan sekedar memberikan *sense of belonging*, tetapi lebih dari itu, status hukum yang memberikan hak–hak hukum, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang–undangan. Sebagaimana disinggung diatas, apakah hak–hak hukum mereka akan sama dengan WNI yang berkewarganegaraan tunggal. Apakah hanya sebatas hak sosial ekonomi untuk dapat membeli dan memiliki tanah, rumah, dan dapat bersekolah? Tentu lebih substantif dari sekedar aspek administratif seperti itu. Jika demikian, kiranya perlu dikaji secara lebih mendalam dan multi aspek. ●

DENI HARIANTO AMD. IM.,SH.,M.SI/
KEPALA SUB SEKSI INFORMASI KANTOR IMIGRASI KARAWANG

PERGESERAN DANA GLOBAL SEMAKIN BUKA PELUANG INVESTASI INDONESIA

TARGETJOBS.CO.UK

Awal 1990-an pengamat ekonomi dunia telah memperkirakan abad ke-21 akan menjadi milik Asia. Satu dasawarsa memasuki *millenium* ini, negara–negara Asia terutama Tiongkok, India dan negara anggota ASEAN menjadi sorotan pasar investasi, Pada saat yang sama *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Indonesia belum menunjukkan lonjakan kenaikan yang cukup signifikan seperti pada awal 2010 hingga sekarang. Tampaknya aliran dana tersebut mulai bergeser, dimana Pengelola Aset Global menilai Asia Tenggara saat ini menjadi lokasi investasi paling aman dari volatilitas, seiring akselerasi ekonomi yang sedang berjalan. Secara khusus, dua negara ASEAN pada tahun ini Indonesia dan Thailand menjadi negara penarik limpahan dana terbesar yang berpindah dari Tiongkok, dibandingkan pasar saham negara di Asia lainnya. Alasan kecewa dengan kinerja Tiongkok dan peluang yang lebih kecil menjadi pemicu *fund global* (investor skala besar pengelola dana) cenderung menggeser penempatan dana dari pasar Tiongkok dan Jepang yang terus bergejolak, ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Thailand.

Hal itu terlihat dari penguatan (apresiasi) nilai tukar mata uang di sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti mata uang Rupiah menguat 5,4% sepanjang tahun ini (*year to date*) yang berarti Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan sebagai tempat investasi.

United Nations Conference on Trade and Development dalam laporannya di tahun 2014 sebelumnya telah memprediksi potensi Indonesia menduduki urutan ke-3 sebagai negara paling prospektif pada periode 2014 - 2016 melompat dari urutan ke-18 pada tahun 2012 - 2013. Tentunya tantangan sekarang sudah jauh berbeda dari masa krisis ekonomi yang mendera Indonesia pada 1998 di mana angka pertumbuhan sempat menyentuh (-)13,6% yang timbul akibat kebutuhan pembayaran hutang swasta jangka pendek dan tidak dilindungi (*undhedged*) secara besar-besaran. Kelangkaan mata uang asing membuat kreditur enggan memberikan pinjaman baru yang berimbas pada sektor lain termasuk investasi asing hingga menyebabkan kolaps-nya ekonomi Indonesia saat itu. Indonesia dewasa ini terus mengalami kemajuan pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi keaadaan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia ditambah implikasi

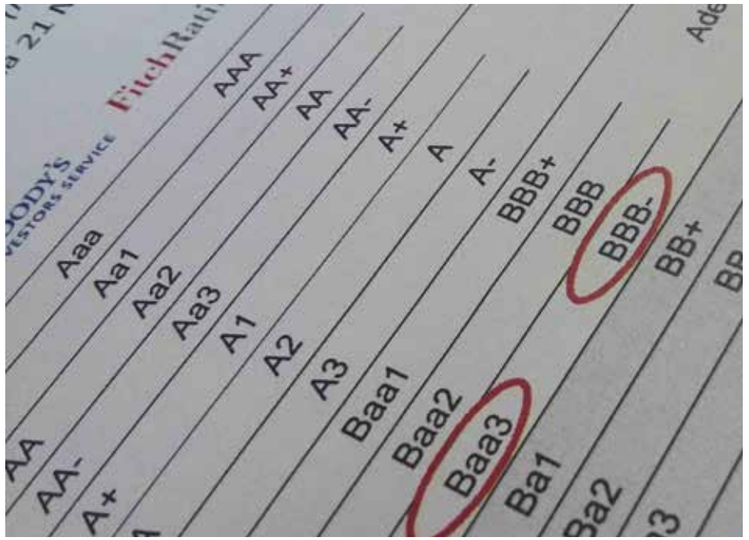

KEMENKEU.GO.ID

keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Bank Dunia memperkirakan ekonomi nasional hanya tumbuh sekitar 5,1% pada tahun 2016 ini, sedangkan IMF memproyeksikan di 2017 pertumbuhan India 7,5%, Tiongkok sekitar 6% dan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina) berada di kisaran 5% sampai 5,5%. Untuk menjaga momentum pertumbuhan dan agar mesin ekonomi tetap berjalan seperti yang diharapkan tentunya harus diimbangi dari aliran investasi. Konsumsi domestik untuk menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sementara investasi yang cukup dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. Penambahan investasi selalu dibutuhkan untuk menggantikan barang modal (mesin, pabrik, dsb.) lama atau sebagai perawatan investasi yang mengalami depresiasi serta untuk alokasi pembangunan infrastruktur yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan konektifitas ASEAN. Tingkat pertumbuhan investasi inilah menjadi poin penting bagi Indonesia.

Sebagaimana dimaklumi, para pelaku pasar keuangan tidak menyukai ketidakpastian bisnis dan akan memperhatikan perkembangan kebijakan dan kestabilan suatu negara. Apa yang dilakukan pemerintah dengan mengubah dan memperbaiki struktur ekonomi, termasuk otoritas terkait serta ditunjang reformasi anggaran yang mendukung kenaikan pembiayaan infrastruktur membangkitkan keyakinan internasional semakin berkembang sehingga mendorong investasi untuk masuk ke negeri ini. Bank Indonesia (BI), pada bulan Mei 2016 menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara peringkat kedua untuk tujuan investasi terfavorit setelah Tiongkok. Salah satu indikatornya adalah realisasi investasi Indonesia naik sekitar 15% tahun lalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja selain Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun lalu juga meningkat di atas 10%.

Pergeseran dana di kawasan ASEAN juga terefleksi dalam laporan investasi ASEAN 2015, dimana aliran FDI mengalami peningkatan pada tiga tahun berturut-turut dari 117,7 miliar di 2013 menjadi 136,2 miliar pada 2014, di tengah – tengah pelemahan ekonomi global dan penurunan investasi dunia sebesar 16%. Secara kolektif negara anggota ASEAN menerima aliran FDI terbesar di antara negara berkembang. Peningkatan tersebut karena fundamental ekonomi kawasan yang kuat, keunggulan biaya, integrasi kawasan dan upaya terus menerus memperbaiki iklim investasi di ASEAN sehingga kini dipandang sebagai tujuan utama dalam menarik investasi serta mempengaruhi strategi korporasi di kawasan. Jika dilihat pendistribusian investasi maka yang terbesar masuk ke sektor jasa dengan penyerapan 60% kemudian diikuti sektor manufaktur sebesar 24,2%. Sementara sumber investasi 2015 berasal dari internal ASEAN sebesar 18,5% kemudian diikuti Uni Eropa 16,4%, Jepang 14,5%, Amerika Serikat 10,2% dan Tiongkok 6,8% senilai 120 miliar dolar AS.

Gelombang investasi juga terekam pada catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyebutkan kenaikan investasi sebesar 15% pada tahun 2015, naik dari US$ 7,93 miliar menjadi US$ 9,1 miliar di samping komitmen negara anggota ASEAN 2015 juga naik 79% dibanding tahun 2014. Indonesia berada di peringkat teratas penyerap investasi intra-ASEAN 2015 sebesar 42,1% berbanding 15,4% untuk peringkat kedua. Namun dari segi aliran total neto (*total net inflow*) menunjukkan Indonesia menduduki tempat kedua, menikmati 13,4% dari kue aliran investasi yang masuk ke ASEAN. Dari angka tersebut kiranya masih terdapat ruang cukup lebar untuk peningkatan pangsa investasi mengingat salah satu negara ASEAN terbesar menikmati 51,1% kue aliran investasi neto (jumlah intra dan ekstra ASEAN) yang masuk dengan cara terus memperbaiki iklim investasi seperti perbaikan logistik dan infrastruktur, perizinan usaha, regulasi dan isu tenaga kerja.

Dengan semakin baiknya faktor penunjang investasi di atas serta keberhasilan melakukan efisiensi dan menekan risiko investasi secara drastis akan meningkatkan investasi swasta sehingga diharapkan membawa kemakmuran dan kemaslahatan bangsa serta menjadikan abad ke 21 milik bangsa Indonesia. Semoga.●

DODDIE HERADO/ SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

MEMBANGUN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA TANPA BATAS WILAYAH DI ASEAN

Tahukah pembaca MMA bahwa Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN? Perjanjian tentang Pembentukan Sekretariat Regional ini ditandatangani oleh para Menteri Pariwisata ASEAN dalam Pertemuan ke-16 *ASEAN Tourism Minister* (ATM) pada 31 Desember 2015. Saat ini Indonesia tengah menjalankan proses ratifikasi perjanjian tersebut agar dapat berlaku dalam hukum nasional Indonesia.

Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan mengenai *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA-TP)* yang telah disahkan oleh para Menteri Pariwisata ASEAN di Bangkok, Thailand pada 9 November 2012.

Pengaturan Saling Pengakuan atau *Mutual Recognition Arrangements (MRA)* merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional dan pengalaman kerja dari para pekerja profesional. Saat ini ASEAN telah memiliki MRA di 8 bidang profesi termasuk pariwisata.

Tujuan pembentukan MRA adalah menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mencapai kesetaraan serta pengakuan di antara negara anggota ASEAN dalam hal pendidikan dan pelatihan, pengalaman, serta persyaratan lisensi untuk praktek profesi. MRA memberikan manfaat berupa pengurangan biaya, kepastian akses pasar, peningkatan daya saing serta pergerakan tenaga kerja profesional yang lebih bebas di ASEAN.

Mekanisme kesepakatan untuk saling mengakui atau MRA di bidang tenaga profesional pariwisata bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas tenaga profesional pariwisata ASEAN yang mengacu pada *competency based tourism qualifications/certifications* sekaligus meningkatkan kualitas jasa tenaga profesional pariwisata di ASEAN.

BALIHOTELTOURS.NET

Salah satu hotel di Bali.

Menurut Yoshifumi Fukunaga, peneliti dari *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* dalam tulisannya yang berjudul *"Assesing the Progress of ASEAN MRAs on Professional Services"*, terdapat perbedaan yang signifikan antara ASEAN MRA di bidang tenaga profesional pariwisata dengan ASEAN MRA di bidang lainnya. ASEAN MRA di bidang lain mengeluarkan pengakuan terhadap sertifikasi profesi dari negara-negara ASEAN tersebut. MRA menjadi sangat penting agar sertifikasi profesi yang telah dikeluarkan oleh salah satu negara ASEAN juga diakui oleh negara anggota ASEAN lainnya. ASEAN MRA di bidang tenaga profesional pariwisata lebih menekankan pada standar kompetensi yang berfungsi sebagai penanda kualitas.

Agar sektor pariwisata terus tumbuh dan terus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian ASEAN, daya tarik wisata ASEAN tentunya perlu ditunjang oleh kualitas jasa industri pariwisata yang prima. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata yang berkompeten. MRA di bidang tenaga profesional pariwisata merupakan salah satu langkah nyata ASEAN untuk terus meningkatkan daya saingnya di sektor pariwisata secara global.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian ASEAN. Berdasarkan data statistik ASEAN, tercatat lebih dari 108 juta wisatawan yang berkunjung ke kawasan ASEAN pada tahun 2015. Sektor ini menyumbang 4.6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 9,3 juta individu atau 3,2% dari jumlah tenaga kerja di ASEAN secara keseluruhan.

Bagi kita bangsa Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor yang tangguh dan tahan terhadap krisis karena tetap tumbuh di kala industri lain mengalami kelesuan. Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, sektor pariwisata Indonesia menyumbang sekitar 10% dari total PDB Indonesia atau sekitar 82 miliar dolar AS. Selama 5 tahun terakhir, sektor pariwisata terus mengalami pertumbuhan positif sebesar 4.8%. Pertumbuhan ini lebih baik dari sektor lain, seperti minyak dan gas, pertanian, maupun industri manufaktur yang mengalami pertumbuhan negatif.

Naskah penjelasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pengesahan Perjanjian Pembentukan Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP menyebutkan dua bidang dalam MRA tenaga profesional pariwisata, yaitu bidang hotel dan restoran serta bidang usaha perjalanan wisata dan operasi perjalanan (*Travel Agencies dan Tour Operator*). Dari kedua bidang tersebut, teridentifikasi profesional di sub bidang: *front office; food and beverage services; food productions*; dan *house keeping* untuk bidang hotel dan restoran, serta sub bidang Usaha Perjalanan Wisata; dan Operator Perjalanan untuk bidang usaha perjalanan dan usaha operasional perjalanan, yang secara keseluruhan mencakup 32 *job titles*.

Pengesahan perjanjian sebagai Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN tentunya akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya berupa *multiplier effect* dari sisi ekonomi dan membuat Indonesia dapat lebih dikenal lagi sebagai destinasi wisata di kawasan ASEAN. Keuntungan lainnya adalah meningkatkan peluang kerja sama dan kapasitas SDM kepariwisataan nasional berbasis kompetensi, serta menstimulasi tenaga profesional pariwisata Indonesia untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan kemudahan mobilitas bagi tenaga kerja profesional pariwisata Indonesia sehingga dapat bekerja tanpa mengenal batas wilayah di kawasan ASEAN. ●

ANNIE YULIYANTI/SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

ASEAN MRA ON TOURISM PROFESSIONALS

KESEPAKATAN: 32 *JOB TITLES*, 6 *LABOUR DIVISIONS*

HOTEL SERVICES				TRAVEL SERVICES	
FRONT OFFICE	HOUSEKEEPING	FOOD PRODUCTION	FOOD &BEVERAGE SERVICES	TRAVEL AGENCIES	TOUR OPERATOR
FRONT OFFICE MANAGER	EXECUTIVE HOUSEKEEPER	EXECUTIVE CHEF	F&B DIRECTOR	GENERAL MANAGER	PRODUCT MANAGER
FRONT OFFICE SUPERVISOR	LAUNDRY MANAGER	DEMI CHEF	F&B OUTLET MANAGER	ASSISTANT GENERAL MANAGER	SALES & MARKETING MANAGER
RECEPTIONIST	FLOOR SUPERVISOR	COMMIS CHEF	RECEPTIONIST	SENIOR TRAVEL CONSULTANT	CREDIT MANAGER
TELEPHONE OPERATOR	LAUNDRY ATTENDANT	CHEF DE PARTIE	HEAD WAITER	TRAVEL CONSULTANT	TICKETING MANAGER
BELL BOY	ROOM ATTENDANT	COMMIS PASTRY	BARTENDER		TOUR MANAGER
	PUBLIC AREA CLEANER	BAKER	WAITER		
		BUTCHER			

SUMBER: AECCENTER.KEMENDAG.GO.ID

GELIAT UMKM BISNIS HOTEL KELAS MELATI DI BALI PADA ERA MEA

Suasana *Workshop* Sertifikasi Kompetensi dan sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata.

Oleh:
DR. SAROHA MANULANG, SE, MM
Kasie Pengelolaan Data dan Pelaporan Perlintasan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Bali yang menyandang gelar sebagai "Pulau Terbaik di Dunia" dari *Best of Reader's Choice Award 2015 Condé Nast Traveler* masih menjadi destinasi favorit para pelancong dunia. Dinas Pariwisata Bali mencatat sebanyak 1.471.063 wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali pada bulan April 2016. Jumlah ini lebih tinggi 16,8 persen dibanding tahun lalu. Wisatawan mancanegara asal Australia dan Tiongkok masih mendominasi sebesar 22,7 persen dan 21,4 persen dari total jumlah wisman yang datang ke Bali. Pasar hotel dan akomodasi di Bali masih didominasi wisman dari negara-negara Asia, diikuti kemudian oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Namun, potensi pasar lainnya datang dari negara-negara Timur Tengah yang sejak 2014 jumlah wisatawannya terus meningkat sebesar 92 persen.

Persaingan Hotel Kelas Melati

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara termasuk Australia membuatnya menjadi pasar wisatawan mancanegara. Hal ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan untuk pariwisata Bali. Di balik hal tersebut, terjadi peningkatan pelanggaran peraturan di Indonesia. Pemerintah berharap semua pihak dapat berperan aktif dan tetap menjaga kedamaian, ketertiban, kedaulatan negara, dan norma-norma aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga keberlangsungan pariwisata dapat tetap berkontribusi positif terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dibarengi dengan bertambahnya jumlah sarana akomodasi karena para investor melihat perkembangan pariwisata Bali merupakan arena yang menarik untuk menanamkan modalnya terutama di bidang sarana akomodasi. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan, tahun 2012 jumlah sarana akomodasi yang terdiri dari hotel berbintang, hotel kelas melati dan pondok wisata di Bali adalah 1.914 unit dengan jumlah kamar mencapai 35.259 kamar, sedangkan tahun 2015 menjadi 2.079 unit dengan 60.313 kamar. Terjadi peningkatan jumlah hotel sebesar 8,63 persen dan 71 persen pada jumlah kamar yang tersedia.

Persaingan sarana akomodasi di Pulau Bali tidak saja terjadi antar pengusaha hotel berbintang, *city hotel* ataupun hotel melati. Persaingan yang lebih hebat juga terjadi setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Pelaku usaha pariwisata termasuk UMKM yang bergerak di bidang pariwisata harus siap menghadapinya karena sistem pasar bebas memasuki negara Indonesia, persaingan bisnis bukan hanya diantara pengusaha Indonesia tetapi juga sesama pengusaha di wilayah ASEAN.

Sistem pasar bebas akan memberikan tantangan dan peluang usaha bagi pelaku usaha pariwisata Indonesia. Untuk dapat mendapatkan peluang, pelaku usaha pariwisata harus mampu memenuhi standar usaha pariwisata dengan meningkatkan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Seluruh usaha pariwisata akan diaudit oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang mandiri untuk mendapatkan Sertifikat Usaha Pariwisata seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Dengan adanya sertifikat tersebut, usaha pariwisata mendapat kesempatan untuk bersaing dengan perusahaan asing yang masuk ke Indonesia.

Pesatnya pembangunan hotel baru kelas melati di tengah kota memberi dampak pada terjadinya kelebihan jumlah kamar dibandingkan permintaan atau tingkat hunian. Hal ini, tentunya juga berdampak pada turunnya pendapatan hotel dan persaingan harga sewa kamar.

Terjadinya persaingan harga sewa kamar berimplikasi terhadap semakin murahnya penawaran paket wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan wisata, apalagi saat ini biro perjalanan wisata dengan mudah menawarkan produknya melalui internet. Kondisi itu, semakin memperkuat Bali sebagai destinasi wisata murah. Sehingga, wisatawan yang datang ke Bali bukanlah seperti yang diharapkan banyak orang, yaitu wisatawan yang berkualitas, namun masih bersifat wisatawan massal (*mass tourism*).

Adanya pengembangan hotel kelas melati yang tersebar di Bali merupakan akomodasi yang lokasinya dapat menyatu dengan *zoning* perdagangan dan jasa dan kawasan pemukiman tertentu. Oleh karena itu, penataan pembangunan hotel kelas melati perlu dilakukan agar perkembangan wilayah dan penataan ruang di Pulau Bali sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali serta untuk pemerataan pergerakan ekonomi masyarakat di wilayah Provinsi Bali, dimana kebanyakan hotel kelas melati dikelola dan dimiliki oleh UMKM di Bali.

Salah satu hotel kelas melati di Bali.

Meskipun hotel-hotel kelas melati dikelola oleh UMKM dengan manajemen sederhana, namun hotel-hotel kelas melati tersebut juga memanfaatkan internet sebagai media promosi dan bekerja sama dengan perusahaan perjalanan *online* internasional seperti Agoda, Traveloka ataupun Trivago. Dengan berkembangnya teknologi, sebagian besar hotel kelas melati di Pulau Bali memanfaatkan internet sebagai media promosinya dan bekerja sama dengan perusahaan bisnis perjalanan *online*.

Strategi UMKM Dalam Menjalankan Bisnis Hotel Kelas Melati

Perkembangan *city hotel* di Bali telah meningkatkan persaingan antar *city hotel*. Kondisi tersebut memaksa sejumlah UMKM pengelola hotel kelas melati menyusun strategi bisnisnya agar dapat tetap bertahan, dan tidak semakin terpuruk. Pada dasarnya strategi bisnis yang ditetapkan tidak berbeda dengan *city hotel*, yaitu strategi harga, promosi dan menjaga segmen yang telah menjadi pelanggannya.

Dampak positif perkembangan *city hotel* di Bali adalah hotel kelas melati meningkatkan promosi hotelnya. Promosi mempunyai peranan penting dalam melakukan penjualan. Promosi akan efektif jika sasaran dan komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Untuk memasarkan hotel, salah satunya dilakukan dengan berpromosi melalui berbagai cara seperti iklan (*advertising*), menawarkan hotel langsung kepada tamu (*personal selling*), bekerja sama dengan pihak lain (*sales promotion*), barang-barang hotel yang diperjualbelikan (*merchandising*) ataupun menjalin komunikasi secara intens dengan mitra dan pelanggan (*public relation*).

Mencermati dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *city hotel* di Bali telah berdampak kepada usaha hotel kelas melati dan juga antar-*city hotel*. Keadaan ini memicu timbulnya persaingan antar-*city hotel* untuk dapat bertahan dalam bisnis hotel. Untuk itu pengelola *city hotel* dan hotel kelas melati yang pada umumnya dikelola oleh UMKM melakukan strategi harga untuk menarik tamu sebanyak-banyaknya. Sebagian besar *city hotel* menawarkan harga serendah-rendahnya dengan melakukan promosi secara gencar untuk dapat meningkatkan tingkat hunian dan pendapatan hotel, sedangkan hotel kelas melati menetapkan harga sewa kamar dengan memberlakukan potongan harga pada saat *low season* dan menaikkan harga pada saat *high* dan *peak season*.

Kondisi semacam ini tentu tidak diharapkan oleh semua pihak karena akan mengancam keberlangsungan bisnis pariwisata khususnya bisnis sarana akomodasi. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mengenai jumlah ideal hotel sesuai dengan jumlah kunjungan wisatawan di Bali. UMKM pengelola hotel kelas melati juga tetap menjaga kualitas pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan agar sesuai dengan harga yang diberikan kepada tamu, sehingga dapat memberikan kepuasan. ●

ANNINDIA PUTRI LUBIS

INDONESIA MEMILIKI DESTINASI WISATA TERINDAH

Negara-negara ASEAN memiliki keunggulan pariwisata yang sangat memikat para wisatawan untuk berkunjung menikmati keindahan destinasi wisata yang ditawarkan setiap negara. "Banyaknya kunjungan wisatawan asing juga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara," kata Annindia Putri Lubis Mahasiswi Universitas Moestopo Jakarta.

Salah satu negara ASEAN yang ia kunjungi adalah Singapura. "Singapura memiliki sisi menarik. Meskipun wilayahnya yang tidak cukup luas sehingga destinasi wisata yang ada tidak banyak, namun Singapura sendiri mampu menarik wisatawan asing untuk berlibur ke negaranya," tutur Anindia.

Namun, Ia juga mengaku ingin mengunjungi seluruh destinasi wisata yang berada di Indonesia. "Menurut saya Indonesia memiliki destinasi wisata terindah yang layak untuk dikunjungi. Dengan ribuan pulau yang sangat menawan yang berjajar dari Sabang hingga Merauke, Indonesia juga memiliki semua keunggulan destinasi wisata yang ada di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Mulai dari pantai, gunung dan candi yang dimiliki setiap daerah dengan ciri khas tersendiri yang menjadikan Indonesia semakin berwarna," ungkap Anindia.

"Destinasi wisata di Indonesia terkenal bukan hanya karena alamnya yang begitu indah, melainkan juga karena budaya asli di setiap tempat yang masih sangat kental dan terjaga kelestariannya," pungkasnya. ●

DITO R

TIDAK TERLALU JAUH

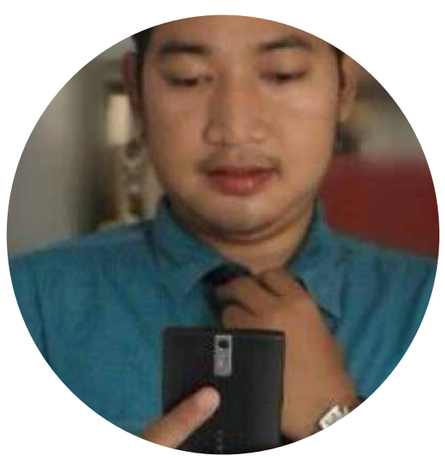

Wisatawan Indonesia tidak perlu terbang jauh-jauh untuk berlibur dan menikmati wisata menarik dan berkualitas. Negara-negara di ASEAN memiliki destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan negara lain di dunia.

Wisata ASEAN banyak menawarkan keindahan alam yang masih alami, serta beragam kuliner yang bisa diterima oleh selera Indonesia. Contohnya Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos. "Wisata negara ASEAN yang sering saya kunjungi adalah Singapura dan Malaysia, karena jaraknya tidak terlalu jauh," kata Dito R, karyawan salah satu Bank Swasta.

Jika ditanya destinasi wisata ASEAN lain yang ingin dikunjungi, Dito mengaku sangat ingin berkunjung ke Kamboja. "Ada banyak tempat indah untuk dilihat di Kamboja, seperti candi *Angkor Wat*, *Archaeological Park*, dan tempat-tempat eksotis lain," tutur Dito.

"Yang terpenting liburan ke negara ASEAN cukup murah, karena biaya untuk penginapan dan makan tidak terlalu menguras kantong kita," jelas Dito.●

ZIKRI RAHMAN

NEGARA ASEAN WAJIB DIKUNJUNGI

ASEAN merupakan salah satu kawasan yang memiliki pesona alam luar biasa yang tersebar di hampir seluruh negara anggotanya. Thailand, Laos, Vietnam, dan tak terkecuali Indonesia merupakan contoh negara ASEAN yang memiliki destinasi wisata unggul. "Bagi siapapun yang menyukai *traveling*, negara–negara di kawasan ASEAN merupakan destinasi wajib yang harus dikunjungi," tegas Zikri Rahman, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang

Ia mengagumi pesona alam yang ada di Thailand. Dengan kondisi geografis yang hampir menyerupai Indonesia, Thailand merupakan *top list* tujuan destinasi yang ingin ia kunjungi. "Thailand memiliki alam yang indah, namun tetap dipadukan dengan unsur modern. Banyak tempat menarik di Thailand yang wajib dikunjungi, diantaranya *Wat Phra Kaew*, Pulau *Phuket*, Pantai *Pathaya*, Candi Putih, dan lainnya," ujar Zikri. ●

SULISTYO

LEBIH MURAH KE NEGARA ASEAN

Wilayah ASEAN adalah destinasi wisata yang menarik untuk di kunjungi. Ini karena, negara-negara ASEAN seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Laos, Vietnam dan Kamboja menawarkan begitu beragam lokasi wisata.

Enaknya, wisata ke sesama negara ASEAN tidak memerlukan visa. Jarak tidak terlampau jauh, kultur dan budaya juga tidak terlalu berbeda. "Akomodasi pun tak diragukan lagi lebih murah berlibur ke negara–negara ASEAN ketimbang ke negara-negara di luar kawasan ASEAN," ujar Sulistyo, karyawan di salah satu BUMN.

Menurutnya, wisata ke negara ASEAN juga memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Sulistyo memberi contoh, salah satu destinasi menarik untuk dikunjungi di ASEAN adalah Laos. Negara ini memiliki tempat wisata terkenal yaitu *Luang Prabang*. *Luang Prabang* adalah sebuah kota di Laos yang menurutnya memiliki keindahan luar biasa. "Arsitektur kota ini memiliki gaya yang sangat indah dan elegan. Kebersihan kota *Luang Prabang* yang terjaga juga membuat kita nyaman," ungkapnya●

FANI APRILIA PERDANI

ALAM ASEAN YANG EKSOTIS

Berwisata ke kawasan ASEAN kini banyak diminati oleh berbagai kalangan wisatawan. Termasuk, Fani Aprilia Perdani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fani memilih berwisata ke negara ASEAN karena pengeluaran yang murah, Mulai dari akomodasi, transportasi, serta harga tiket masuk tempat wisata di negara ASEAN cenderung lebih hemat dibandingkan dengan wilayah Eropa atau Amerika.

Lebih dari itu, menurutnya negara ASEAN juga menyimpan daya tarik alamnya yang sangat eksotis. Mulai dari pegunungan sejuk nan indah, sawah hijau yang menyejukkan mata, hingga pantai-pantai berpasir putih yang nyaman, semua dapat ditemukan di wilayah ASEAN.

Fani menyukai Thailand karena wisata ke Thailand menyenangkan. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi baik itu candi, pantai, dan wisata belanja dengan harga yang murah. "Saya juga menyukai Vietnam karena Vietnam mempunya banyak wisata sejarah, seperti *War Remnants Museum, Hoa Lo Prison Museum* dan Terowongan Cu Chi, serta pantai Halong Bay yang indah dan menawan," jelas Fani. ●

Selamat

Hari Ulang Tahun ke-49

ASEAN

Bersama Indonesia ASEAN kuat

Bersama ASEAN Indonesia maju